

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi November Tahun 2021 No. 22

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.*

KA Cepat  
Jakarta-Bandung:  
**Bukan Untuk  
Rakyat**



# Kebijakan Yang Tidak Bijak

Kita benar-benar prihatin dan sedih para pengambil kebijakan mengambil keuntungan di tengah pandemi. Dikala banyak keluarga kehilangan nyawa dan orang tua mereka mengatur strategi mencari sedikit cara menangguk laba. Di Hulu merumuskan peraturan, di hilir mencari peruntungan.

**K**ebijakan lahir dari proses perumusan yang panjang dan seksama, meski pada akhirnya merespon tentang situasi yang terkini. Dalam kebijakan bukan sekedar keputusan dan perintah, di dalamnya ada kebijaksanaan serta berorientasi pada menciptakan manfaat bagi publik. Rumitnya hari-hari ini pembuat kebijakan seperti mengabaikan prosedur normal cara kerja tersebut, karena lebih sering menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif dengan apa yang dibutuhkan.

Belum lama ini gaduh kembali bergemuruh, kala *polymerase chain reaction* (PCR) jadi beban karena kontraproduktif dengan kebijakan vaksinasi dan kebijakan transportasi. Saat Pandemi menganas, PCR tidak

menjadi kewajiban yang diterapkan secara massif. Terbukti kala itu upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing) tidak maksimal, padahal penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan COVID-19.

Tapi anehnya kini kala pandemi agak 'mereda' kebijakan PCR diterapkan pada seluruh moda transportasi, padahal seharusnya mendorong kebijakan vaksinasi yang lebih massif. Tentu saja ini mengandung tanya dan praduga, bahwa kegiatan PCR ini lebih pada orientasi bisnis semata, daripada kebijakan kesehatan yang didasarkan pada kajian yang memadai. Sampai pada akhirnya Presiden Jokowi

berkeluh kesah atas kondisi tersebut "Bagaimana membuat kebijakan tapi tidak dipublikasikan dengan baik. Harga tinggi, kasus rendah,".

Tentu kita semua ingin tetap selamat dan sehat dalam mengarungi pandemi ini. Kita juga sadar bahwa pandemi ini belum berakhir dan tidak menutup kemungkinan 'bergolak dan menggeliat' kembali seperti yang terjadi di beberapa negara. Namun kebijakan PCR yang tidak terkoneksi dengan sistem kesehatan, sesungguhnya hanya akan melahirkan kesia-siaan karena semua berangkat dari motif dan proses yang tidak sejalan. Data terpapar disampaikan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencatat nilai impor alat tes PCR hingga 23

Oktober 2021 mencapai Rp2,27 triliun melonjak drastis dibandingkan dengan bulan Juni senilai Rp 523 miliar.

Pembuat kebijakan memberikan penjelasan syarat tes PCR untuk semua konsumen pesawat bertujuan mencegah penularan pada libur Natal dan tahun baru. Diperkirakan ada lonjakan mobilitas pada masa liburan itu. Kita cukup terperanga dan heran, ternyata kebijakan PCR transportasi lahir dari pada kepentingan pragmatis taktis bukan strategis komprehensif. Setelah ada tekanan yang tinggi dari publik pada akhirnya kemudian PCR ditiadakan, terbukti bahwa ini rupa dan jiwa tidak sejalan.

Kita benar-benar prihatin dan sedih para pengambil kebijakan mengambil keuntungan di tengah pandemi.

Dikala banyak keluarga kehilangan nyawa dan orang tua mereka mengatur strategi mencari sedikit cara menangguk laba. Di Hulu merumuskan peraturan, di hilir mencari peruntungan.

Publik bukan enggan menunaikan keputusan dari kebijakan, namun jika 'janggal dan ganjil' tentu ada sejuta tanya yang berkecamuk. Terlebih aktivitas tersebut menyangkut angka dan terikat dengan data yang tidak transparan, maka menjadi wajar publik mengernyitkan dahi dan menaruh curiga. proses perumusan kebijakan yang kacau balau seperti ini bukan sekali dua kali, berkali-kali dan berulang kali dalam kurun waktu yang panjang. Kita benar-benar khawatir dengan cara mengambil keputusan seperti ini...



TEROPONG  
DEMOCRACY

AWARD 2021

TEROPONG SENAYAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Selamat & Sukses*

Fraksi PKS DPR RI atas penganugerahan  
`Voices Of Democracy dan Rising Star of Democracy  
dalam Teropong Democracy Award 2021

# IKN Berpotensi Miliki Masalah Tanah, Aleg PKS Ingatkan BPN

KUTIPAN

Samarinda (17/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengingatkan kepada BPN terkait perlunya antisipasi potensi masalah pertanahan di lahan IKN yang akan dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo.

Hal tersebut, disampaikan pria yang akrab disapa Kang Aus dalam Sosialisasi Program Strategis BPN di Hotel Aston Samarinda (16/10/2021).

"Lahan IKN berpotensi memiliki masalah pertanahan di kemudian hari, ini harus menjadi perhatian sedini mungkin oleh BPN. Misalnya perkebunan kelapa sawit dan tanah garapan masyarakat, itu juga berpotensi konflik di lahan IKN," ungkapnya.

Apalagi Kakanwil BPN Kaltim menjelaskan bahwa payung hukum IKN belum ada.

"Payung hukum IKN belum ada sehingga belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat," jelas Asnaedi.

Selain itu, di hadapan

Kakanwil Kaltim Asnaedi dan Kakantah Samarinda Firman Ariefiansyah Singagerda, Aus Hidayat Nur yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI juga mengingatkan terkait kawasan transmigrasi di Kutai Kartanegara.

"Kawasan transmigrasi di Kukar berubah jadi kawasan hutan, sementara para transmigran banyak yang sudah memiliki sertifikat. Ini juga berpotensi konflik," ingatnya.

Acara ini dihadiri oleh 75 peserta dari Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur,

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Lahan IKN berpotensi memiliki masalah pertanahan di kemudian hari, ini harus menjadi perhatian sedini mungkin oleh BPN. Misalnya perkebunan kelapa sawit dan tanah garapan masyarakat, itu juga berpotensi konflik di lahan IKN"

# Anggota DPR-RI Hamid Noor Yasin: KA Cepat Jakarta- Bandung Bukan untuk Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (13/10) — Anggota Komisi V DPR-RI Drs H Hamid Noor Yasin MM, menyatakan, Kereta Api (KA) cepat Jakarta-Bandung ternyata bukan untuk rakyat.

Meski demikian, untuk memperkuat kredibilitasnya, pemerintah menyuntikkan dana segar APBN agar proyek tersebut tidak mangkrak dan terus berjalan.

"Sejak awal, kami di Fraksi PKS telah menolak, walaupun pemerintah menjanjikan proyek ini tidak akan menggunakan APBN," tegas Hamid sembari menilai sebab proyek itu tidak mendesak.

Karena, tambahnya, pergerakan orang di lintas Jakarta-Bandung, masih bisa diakomodir menggunakan moda transportasi yang ada. Yakni KA reguler maupun transportasi darat lainnya melalui jalan tol dan jalan nasional.

Hamid, Anggota Legislatif

asal Dapil IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen), menilai, proyek KA cepat Jakarta Bandung tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian 2030.

Kucuran Dana Ketika pemerintah mengingkari janjinya dan meminta kucuran dana bagi proyek itu melalui PMN Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 4,1 T, maka Fraksi PKS dengan tegas kembali menolak.

"Karena saat ini, sedang fokus berjuang melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi," tegas Hamid, sembari menambahkan apalagi dengan utang BUMN yang semakin mengunung akibat banyaknya penugasan di

bidang infrastruktur.

Kecerobohan itu, tandas Hamid, nampak dari permasalahan yang membelit proyek KA cepat saat ini. Dimana konsorsium Indonesia, kekurangan setoran modal karena cashflow yang berdarah-darah akibat pandemi.

Pembengkakan

Di sisi lain, terjadi pembengkakan kebutuhan anggaran dari perkiraan awal sekitar Rp 86 T sekarang menjadi sekitar Rp 114 T, akibat adanya penyesuaian desain dan geografis.

Hamid, menyebutkan, hal semacam ini tentunya hanya dapat terjadi karena perencanaan yang tidak matang, sehingga butuh banyak penyesuaian yang berakibat pembengkakannya biaya hingga hampir 30 persen.

Belum lagi prediksi saat operasional, nantinya ada kekhawatiran KA cepat itu sepi peminat. Sebab tarifnya tidak berpihak pada kemampuan rakyat. Tarif termurah (Kelas 2) sekitar Rp 300 ribu dengan waktu tempuh 45 menit.

Tarif ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tiket KA reguler yang hanya Rp 90 ribu-Rp125 ribu, atau dibandingkan dengan moda lainnya seperti bus dan travel yang hanya Rp 65 ribu-Rp110 ribu, dengan waktu tempuh yang tidak berbeda jauh.

Apalagi jika Ibu Kota Negara jadi pindah, tentunya



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**  
Anggota Komisi V DPR RI

**"Sejak awal, kami di Fraksi PKS telah menolak, walaupun pemerintah menjanjikan proyek ini tidak akan menggunakan APBN, sebab proyek itu tidak mendesak".**

sangat mempengaruhi aktivitas bisnis dan ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya biaya pembangunan KA cepat dan kekhawatiran akan sedikitnya penggunaannya, mestinya harus menjadi perhatian serius.

Membebani APBN

"Tidak salah jika kemudian kita memandang proyek KA cepat ini ternyata bukan untuk rakyat," tegas Hamid. Karena, pada awalnya akan dibangun inves-

tor, tapi sekarang kenyataannya membebani APBN untuk memsubsidi investor.

Terkait ini, Hamid, mengingatkan jangan sampai keuangan negara terus terbebani oleh proyek tersebut, dan juga jangan sampai BUMN strategis seperti PT KAI terseret masalah keuangan, apalagi bila sampai memicu kebangkrutannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS: IKN Hanya Menambah **Beban Negara**

## KUTIPAN

Jakarta (08/10) Anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, memperjuangkan penolakan pemindahan ibu kota yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

RUU IKN tersebut dipandang oleh Suryadi bukan sebagai agenda mendesak, terutama di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.

“Kalaupun kondisi pandemi ini menurun, seharusnya itu menjadi kesempatan pemerintah untuk ‘recovery’ perekonomian Indonesia, buat kebijakan yang tepat. Jangan gegabah dalam melangkah” tandas Legislator Fraksi PKS tersebut.

Dalam pembahasan internal pemerintah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota. BAPPENAS mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan kajian, namun sangat disayangkan, naskah akademik tersebut tersebut tidak dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik.

“Negara ini milik bersama, pemerintah seharusnya tidak

bersikap autis terutama menyangkut kebijakan strategis. Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta? Apa dosa Jakarta?” ujar Suryadi dalam wawancara PKS Legislative Corner (8/10/2021).

Di sisi lain, PKS juga sudah melakukan kajian serta pendalaman terkait isu tersebut dan belum melihat adanya prioritas dan kepentingan untuk memindahkan ibu kota. Ditambah dengan biaya anggaran yang tidak sedikit. Angka 490 triliun barulah itungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3x lipat. Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya 60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari 100 triliun.

“Dalam kondisi saat ini, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi

agenda prioritas, bukan yang lain. Pemerintah belum memenuhi standar prosedur aturan perundangan untuk memutuskan kebijakan krusial. Kajian-kajian resmi yang melibatkan publik belum ada. Terutama kajian mengenai Jakarta dan lokasi pemindahannya.” Suryadi menambahkan.

Keputusan Fraksi PKS sudah bulat untuk menolak RUU IKN tersebut setelah mengkaji aspek permasalahan secara makro dan mikro. Selain dari segi prosedur yang mana pembahasan kebijakan dilakukan secara tertutup, segi substantif dari kebijakan tersebut juga menjadi pertimbangan. Yakni dalam mendiagnosa permasalahan secara objektif.

“Permasalahan dampak pandemi masih belum menemukan titik terang dan itu menjadi kebutuhan mendesak. Maka apabila berdasarkan fakta empiris Jakarta masih dianggap layak, mengapa harus melakukan pemborsan yang berujung pada menambah beban negara?” tegasnya.



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**  
Anggota Komisi V DPR RI

“Dalam kondisi saat ini, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas, bukan yang lain. Pemerintah belum memenuhi standar prosedur aturan perundangan untuk memutuskan kebijakan krusial. Kajian-kajian resmi yang melibatkan publik belum ada. Terutama kajian mengenai Jakarta dan lokasi pemindahannya”

# Pendanaan Kereta Api Cepat dari APBN, Politisi PKS: Proyek ini **Bermasalah!**

## KUTIPAN

Jakarta (12/10) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Bila dirunut kembali proses persetujuan proyek ini, kata Nevi, awalnya tidak ada jatah modal negara untuk KAI tahun ini sesuai UU APBN 2021.

"Seiring berjalannya waktu dan pengerjaan proyek mulai dilakukan, di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp 7 triliun untuk KAI," ungkapnya.

Kondisi ini, kata Nevi, memunculkan kontroversial dimana, jatah PMN untuk KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021. Dari usulan awal, tidak semuanya dipakai untuk proyek kereta cepat.

"Kami di Komisi VI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dirut PT KAI Pada 2 September, dimana PT KAI menyampaikan PMN ke Komisi VI sebesar Rp4,1 triliun karena ada pembengkakan

biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS pada proyek kereta cepat. Yang menjadi Persoalan adalah, Negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan seseserpun APBN, dan coba cari solusi lain. Ini dana Negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi", urai Nevi.

Nevi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR Perwakilan FPKS mengatakan, semestinya Investasi kereta cepat dapat diperhitungkan secara matang karena ini proyek yang sangat besar menelan biaya. Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China

(KCIC) sekarang.

Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama komisi VI dan V yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya mengusulkan, kalo perlu digesa audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi cepat dapat diselesaikan.

Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini", tukas Nevi.

Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja. Menurut Nevi, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi Negara melalui deviden sebagai PNBPN. Tapi pada kenyataannya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk"

panдеми dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan

menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk", tutup Nevi Zuairina.

Proyek Kereta Cepat Akhirnya  
Ambil Jatah Rakyat,

# Pemerintah **Korbankan** APBN yang Sudah ‘Berdarah’

## KUTIPAN

Jakarta (12/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021,

yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Perpres terbaru, kata Ecky, me-nyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan-kan proyek KCJB dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya.

"Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah," terang Ecky.

Ecky berpendapat bahwa Perpres baru hanya akal-akalan Pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB.

"Skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyaltaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat," jelas Anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.

Legislator PKS ini kembali proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan yang tidak matang. Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah

dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan perhitungan dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat.

"Dalam proses pembangunannya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US\$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar US\$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun. Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak akurat, pengurangan lahan tidak tepat, keterlambatan proyek, serta biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini," urainya.

Selain itu, Ecky juga menuntut harus adanya audit investigasi terhadap proyek yang disinyalir akan merugikan keuangan negara.

"Kondisi tersebut jelas ironi dengan kondisi APBN yang saat ini masih harus fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN)," pungkasnya.

Ecky mengemukakan untuk



## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Penambahan beban pajak harus dirasakan masyarakat, karena kebijakan ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang kian dalam. Artinya bahwa adanya alokasi APBN untuk hal yang tidak esensial dan lebih kepada pemenuhan hasrat Pemerintah dalam membangun proyek KCJB tersebut, akan mencederai asas atau nilai keadilan dalam UUD 1945.”

PC-PEN saja, APBN masih berdarah-darah. Meskipun terdapat pelonggaran defisit yang mengakibatkan utang melonjak tajam, beberapa hak

rakyat kecil masih harus dipangkas dengan pengurangan berbagai subsidi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Dinilai Tidak Berkeadilan PKS **Tolak** RUU HPP, Aleg PKS: Pandora Papers Bukti Penghindaran Pajak

## KUTIPAN

Jakarta (08/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengomentari terkait data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) terkait skema penghindaran pajak yang diduga merugikan negara-negara asal.

Menurut Anis, dengan terbukanya ke publik data Pandora Papers menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku para pejabat di negara ini.

"Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan," kata Anis (08/10).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia

berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 di 2019.

"Perbaikan tax ratio ini sangat penting mengingat kondisi fiskal kita yang semakin berat, apalagi dengan hutang negara yang semakin membengkak," katanya.

Legislator PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) justru skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimum Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.

"Fraksi PKS jelas menolak

RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD," katanya.

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini maka praktik penghindaran pajak di Indonesia akan tetap muncul.

Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan bagi sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi WP taat dan patuh.

"Apalagi dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang tarifnya mirip tax amnesty jilid 1, tarifnya lebih rendah dari versi surpresnya. Wajib pajak yang sudah patuh jelas akan merasa dirugikan, akan menurunkan kepatuhan wajib pajak secara umum," jelasnya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN juga dikritisi oleh Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Kuncinya sebetulnya kan pada pemulihan ekonomi dan daya beli, ketika ekonomi bergerak otomatis penerimaan pajak akan meningkat. Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,"



# PKS: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rusak Kredibilitas Proyek BUMN

## KUTIPAN

Jakarta (14/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai keputusan pemerintah menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan berpeluang merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN

“Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Ia menduga penyebab pembengkakan biaya proyek tersebut karena unsur ketidakhati-hatian dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan. Selain itu, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif juga perlu diceermati.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, proyek tersebut tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir

2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh.

“Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif,” pungkasknya.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif”

# JEBAKAN PINJOL ILEGAL



**PKS mendesak pemerintah untuk tegas menyelesaikan masalah pinjaman online (pinjol) dari hulunya**

■ Maraknya kasus pinjaman online (**pinjol**) ilegal menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

■ **19.711** aduan sejak 2019 s.d Oktober 2021

■ Sejak 2018, OJK blokir **3.516** aplikasi/website pinjol ilegal

■ Fenomena pinjol ilegal ini muncul dan mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang **membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat.**



- Bunga yang begitu tinggi
- Diteror debt collector
- Mengakhiri hidup karena terlilit utang

**Penagihan tidak beretika Pinjol Ilegal**



Pencairan dana tanpa persetujuan



Ancaman penyebaran data pribadi



Melakukan teror dan intimidasi kepada seluruh kontak peminjam



Menggunakan kata kasar dan pelecehan seksual

# Dr. Salim: Penanggulangan Covid 19 Amanat Konstitusi UUD 1945

## KUTIPAN

Jakarta (05/10) --- Ketua Majelis Syura Fraksi PKS Habib Salim Segaf Aljufri menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS DPR RI dan usaha diplomasi dunia dalam menanggulangi Pandemi Covid-19.

Dr. Salim secara resmi membuka acara Ambassador Talks Fraksi PKS DPR RI bertajuk "Diplomacy in Times of COVID-19 Pandemic" yang digelar secara virtual pada Selasa (05/10/2021).

Ketua Majelis Syura Fraksi PKS menyampaikan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dapat diterima dengan baik dan dihormati oleh berbagai negara. Hal tersebut ditunjukkan atas keikutsertaan Indonesia dalam memberikan bantuan kepada negara-negara sahabat, yakni berupa alat kesehatan dan obat-obatan.

"Bentuk komitmen dan kepedulian PKS juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu ikut bersama-sama berkontribusi bagi

### AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

## Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

kemaslahatan warga dunia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang 1945," ujar Salim.

Vaksin telah menjadi game of changer dalam mengatasi Covid-19, namun di sisi lain pemenuhan vaksin seringkali menunjukkan ketimpangan yang besar baik dalam riset, teknologi, dan kapasitas ekonomi antara negara maju dan berkembang

Diperkirakan lebih dari 350 Miliar USD atau setara dengan Rp.4.576 Triliun biaya

yang dibutuhkan dalam menyediakan vaksin di seluruh dunia. PKS berpendapat bahwa bisnis vaksin memang sangat menggiurkan, namun kita membutuhkan rasa kemanusiaan daripada bisnis semata.

PKS juga menyerukan empat harapan yang dapat diambil atas Pandemi Covid-19. Pertama, Pandemi Covid-19 diharapkan mampu mendorong negara-negara dunia untuk bersatu dalam mengerahkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengatasi wabah ini. Kedua, Pandemi Covid-19 harus mendorong solidaritas, negara-negara dunia harus mampu bekerja sama dalam mengendalikan wabah di masing-masing negaranya. Ketiga, Pandemi Covid-19 harus mampu mentransformasi struktur global dalam kesejahteraan warga dunia, negara kuat harus bisa menopang negara yang lemah. Dan keempat, Pandemi Covid-19 harus mampu mewujudkan dunia yang lebih damai, humanis, dan ber-prikemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana Pandemi Covid-19 diharapkan dapat menghindarkan dari adanya



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Bentuk komitmen dan kepedulian PKS juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu ikut bersama-sama berkontribusi bagi kemaslahatan warga dunia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang 1945,"

konflik dan peperangan antar negara-negara di dunia.

"Kita semua berharap Pandemi Covid-19 segera berakhir, kerja sama dunia

semakin erat dalam rangka mewujudkan tata dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan," ungkap Dr. Salim.

# Salim Segaf: Kerjasama dan Solidaritas Global Kunci Penyelesaian Pandemi Covid 19

## KUTIPAN

Jakarta (06/10) --- Fraksi PKS DPR RI kembali menyelenggarakan acara Ambassador's Talks dengan tema 'Diplomacy in Times Covid-19 Pandemic'

dengan menghadirkan narasumber Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Representasi WHO di Indonesia N. Paranietharan, dan Duta Besar Jepang Untuk Indonesia Kenji Kanasugi. Acara dihelat secara virtual dan disiarkan langsung di kanal Youtube PKS dan Fraksi PKS DPR pada Selasa 5 Oktober 2021.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan Ambassador's Talks kali ini ingin menghimpun gagasan, pemikiran dan pengalaman diplomasi dalam konteks penyelesaian pandemi covid 19 yang mengancam umat manusia di dunia. Fraksi PKS sendiri telah menerbitkan Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 dengan berbagai skenario termasuk berkaca dari pengalaman

## AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

### Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

negara-negara di dunia.

"Ini adalah komitmen PKS sebagai bagian dari komunitas global untuk menyelesaikan pandemi melalui diplomasi internasional untuk mendorong kerjasama dan solidaritas antar negara di dunia. Sementara, di level nasional PKS telah melakukan berbagai upaya mulai dari aksi sosial layanan ambulance, pengadaan sanitazer, disinfektan, APD, tabung gas gratis hingga potong gaji anggota dewan," ungkap Jazuli.

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aijufri dalam

Opening Speechnya menegaskan bahwa pandemi ini adalah ujian bagi dunia karena bukan saja mengancam kesehatan dan nyawa umat manusia tapi juga kesejahteraan warga dunia. Banyak negara terdampak mengalami penurunan ekonomi dan berbagai masalah sosial bahkan diambang resesi. Karenanya Salim Segaf menyerukan empat hal agar dunia keluar dari pandemi.

"Pertama, negara-negara dunia harus bersatu mengerahkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi menangani wabah. Kedua, pandemi harus mendorong kerjasama dan solidaritas global. Ketiga, pandemi harus mampu mentransformasi struktur dan sistem global untuk kesejahteraan warga dunia. Keempat, pandemi harus menghentikan ambisi permusuhan, konflik, bahkan peperangan," ungkap Salim.

Dalam pandangan PKS pandemi tidak bisa diselesaikan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh setiap negara. Negara tidak mungkin mengisolasi diri selamanya, mobilitas global tidak mungkin



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

“Negara-negara dunia harus bersatu mengerahkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi menangani wabah. Kedua, pandemi harus mendorong kerjasama dan solidaritas global. Ketiga, pandemi harus mampu mentransformasi struktur dan sistem global untuk kesejahteraan warga dunia.

dicegah. Karenanya butuh kerjasama global dalam pengadaan vaksin dan obat-obatan yang saat ini dirasakan sangat timpang gapnya antara

negara maju/kaya dengan negara berkembang.  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ketua Fraksi PKS DPR RI: Kesehatan adalah Hak Seluruh Rakyat di Dunia

## KUTIPAN

Jakarta (28/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan pentingnya peran PKS sebagai salah satu elemen bangsa dalam melihat dan mengatasi persoalan yang berkembang di Indonesia maupun dunia.

la menyampaikan hal tersebut dalam acara Ambassador Talks Fraksi PKS DPR RI bertajuk "Diplomacy in Times of COVID-19 Pandemic" yang digelar secara virtual pada Selasa (5/10/2021) siang.

"Sejak awal COVID ini, Fraksi PKS membentuk satgas. Satgas ini terdiri dari lintas komisi di Fraksi PKS, bahkan juga menghadirkan para pakar dan ilmuwan dari berbagai macam perguruan tinggi dan akademis untuk mencoba mencari solusi-solusi mengatasi COVID untuk kemudian ditawarkan kepada pemerintah melalui kementerian yang terkait. Sampai kita melahirkan satu buku namanya Buku Putih dalam Mengatasi COVID-19 ini," ujar Jazuli.

PKS telah melakukan berbagai upaya nyata untuk mem-

## AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

### Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

bantu masyarakat selama pandemi, salah satunya adalah memotong gaji anggota PKS dari pusat hingga daerah selama tujuh kali dengan tujuan meringankan beban warga Indonesia, khususnya secara ekonomi. Potongan gaji anggota PKS tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, makanan, serta layanan antar-jemput RS secara gratis.

Jazuli juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam usahanya mengatasi pandemi

COVID-19 melalui jalur "Dari berbagai pertemuan parlemen dunia yang saya ikuti melalui BKSAP selama pandemi COVID, termasuk beberapa hari yang lalu, muncul usulan-usulan dari beberapa negara tentang bagaimana caranya negara-negara besar ikut bersama-sama mewujudkan keadilan dalam distribusi vaksin kepada negara-negara dunia ketiga. Kesehatan adalah hak seluruh rakyat di dunia. Prinsip keadilan dalam mendistribusi vaksin dari negara maju kepada negara dunia ketiga itu perlu, dan saya tahu betul Ibu Menlu adalah salah satu pejuangnya," ungkap Anggota Komisi I DPR tersebut.

Ambassador Talks ini menghadirkan banyak pembicara dari berbagai negara, termasuk dari pihak WHO. Harapannya, terdapat berbagai pandangan, terobosan, dan pengalaman yang dapat diambil oleh PKS untuk merumuskan dalam mengatasi pandemi dengan cepat dan efektif di tengah kasus COVID-19 di Indonesia yang mulai landai, sehingga kemudian pandemi ini dapat berakhir baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia.diplomasi.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Dari berbagai pertemuan parlemen dunia yang saya ikuti melalui BKSAP selama pandemi COVID, termasuk beberapa hari yang lalu, muncul usulan-usulan dari beberapa negara tentang bagaimana caranya negara-negara besar ikut bersama-sama mewujudkan keadilan dalam distribusi vaksin kepada negara-negara dunia ketiga. Kesehatan adalah hak seluruh rakyat di dunia. Prinsip keadilan dalam mendistribusi vaksin dari negara maju kepada negara dunia ketiga itu perlu, dan saya tahu betul Ibu Menlu adalah salah satu pejuangnya,"

# Menlu Retno **Apresiasi** Kegiatan Ambassador Talk dihelat PKS

## KUTIPAN

Menlu RI memberikan semangat baru dalam menjalin ikatan baik untuk berdiplomasi dengan berbagai negara di dunia yang sama-sama fokus menanggulangi virus corona.

### AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

#### Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

Jakarta (05/10) - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyampaikan bahwa kegiatan diplomasi Indonesia saat ini berfokus pada kasus pandemi Virus Corona ketika menghadiri kegiatan secara virtual yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI dalam acara Ambassador Talks dengan tema "Diplomacy in Times of COVID-19 Pandemic" pada Selasa (05/10/2021).

Poin pokok dalam kegiatan ini sangatlah vital karena berkaitan dengan perkembangannya yang sudah memasuki era

kebiasaan baru untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Tentunya, Retno berpendapat bahwa ini merupakan hal yang positif karena semua sendi kehidupan mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala walau dengan protokol kesehatan yang ketat dan harus selalu diterapkan.

"Kita lihat adanya satu tren yang bagus di seluruh dunia terjadi penurunan kasus Covid-19 rata-rata sebesar 9%". Ungkap Retno dalam Pidatonya.

Menlu RI memberikan semangat baru dalam menjalin ikatan baik untuk berdiplomasi dengan berbagai negara di dunia yang sama-sama fokus menanggulangi virus corona.

"Penyelenggaraan Ambassador Talks merupakan salah satu cerminan bahwa kita

'adjust' dimasa kenormalan baru ini". Ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Tidak lupa Retno mengingatkan mengenai kegiatan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia agar terciptanya kekebalan komunal yang memadai di negara ini.

"Manifestasi mengenai segala macam usaha penanggulanagn virus corona di seluruh dunia harus dilakukan dengan kerja sama". Tegus Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.



"Poin pokok dalam kegiatan ini sangatlah vital karena berkaitan dengan perkembangannya yang sudah memasuki era kebiasaan baru untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang positif karena semua sendi kehidupan mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala walau dengan protokol kesehatan yang ketat dan harus selalu diterapkan."



### RETNO MARSUDI

Menteri Luar Negeri RI



# Ambassador Talks FPKS, WHO **Sebut** Diplomasi Vaksin Efektif Tangani Covid-19 di Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (05/10) - Representatif World Health Organization (WHO) untuk Indonesia, Dr. N. Paranietharan mengungkapkan apresiasinya kepada partai PKS yang telah mewadahi ruang diskusi terkait pandemi Covid-19 yakni Ambassador Talks

Dalam acara yang digelar secara virtual tersebut, Paranietharan memaparkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia saat ini adalah memastikan dosis vaksin dapat tersebar secara merata di tiap kabupaten atau kota.

"Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengemukakan dosis vaksinya. Diplomasi vaksin merupakan strategi kunci yang tepat dan efektif dalam kondisi saat ini" ujar Paranietharan.

Ambassador Talks merupakan salah satu program unggulan Fraksi PKS DPR RI yang menghadirkan beberapa narasumber internasional seperti dua besar dan menteri luar negeri.

## AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

### Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

Ruang diskusi yang bertajuk 'Diplomacy in Times of Covid-19 Pandemic' tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 partisipan.

Dalam kesempatan tersebut, Paranietharan juga menyampaikan bahwa sejauh ini Indonesia sudah mencapai jumlah dosis vaksin yang bisa dibilang luar biasa. Menurutnya, Vaksin merupakan 'game changer', dan saat ini di Indonesia sendiri terdapat 170 juta dosis vaksin yang tersedia.

Perwakilan WHO tersebut juga memberikan gambaran bahwa apabila tahun depan Indonesia ingin bebas dari pandemi, maka setiap orang harus dapat memanfaatkan diplomasi dan kepemimpinan politiknya untuk mengupayakan vaksin Covid-19 kepada minimal 70% dari konstituennya. Paranietharan menegaskan bahwa politik merupakan sektor penting yang dapat mendorong kemudahan akses vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, di Jakarta sendiri vaksin dosis pertama sudah mencapai 90% populasi.

"Tidak akan ada yang aman sampai semua orang aman. Indonesia tidak akan aman sampai seluruh provinsi, seluruh kota dan masyarakat lokal mendapatkan dosis vaksin" tegas Paranietharan.

Tidak hanya manajemen kesehatan, namun politik yang sehat dan baik akan sangat membantu upaya penyelesaian pandemi Covid-19 ini. Diplomasi kerjasama internasional yang dibangun antara Indonesia dengan negara lain dapat menjadi salah satu cara terbaik



## Dr. N. PARANIETHARAN

Representatif World Health Organization (WHO) untuk Indonesia

"Apabila tahun depan Indonesia ingin bebas dari pandemi, maka setiap orang harus dapat memanfaatkan diplomasi dan kepemimpinan politiknya untuk mengupayakan vaksin Covid-19 kepada minimal 70% dari konstituennya"

untuk menghadapi tantangan pandemi baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kerjasama

bilateral Indonesia-Jepang dalam pertukaran pengetahuan dan diplomasi vaksin.

# Ambassador Talks FPKS, Jepang siap bantu Indonesia Hadapi Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (05/10) - Duta Besar Jepang H.E Kenji Kanasugi menyampaikan bahwa Jepang mengapresiasi usaha diplomasi Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 di acara Ambassador Talks Fraksi PKS DPR RI bertajuk “Diplomacy in Times of COVID-19 Pandemic” yang digelar secara virtual pada Selasa (05/10/2021).

Jepang dan Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang erat, sehingga Jepang akan selalu mendukung Indonesia dalam memerangi virus COVID-19. Dalam hal ini Jepang turut membantu Indonesia dengan memberikan bantuan oksigen, ventilator, dan menyediakan alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia serta organisasi-organisasi kemanusiaan.

“Jepang dan Indonesia saling mendukung satu sama lain, Jepang juga berkontribusi terhadap alat-alat kesehatan untuk diberikan pada pemerintah Indonesia”, ungkap H.E

### AMBASSADOR TALKS FRAKSI PKS DPR RI

## Diplomacy In Times of Covid-19 Pandemic

Kenji Kanasugi dalam program Ambassador Talks yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.

Dalam hal ini, Vaksin merupakan senjata utama guna menghadapi COVID-19 sehingga perlu adanya konferensi tingkat tinggi.

“Distribusi vaksin kami pastikan sampai ke negara berkembang khususnya Indonesia” ujar H.E Kenji Kanasugi

Pemerintah Jepang telah menyediakan sekitar 23 juta vaksin Skema Covax dan 2,1 juta dosis astrazeneca yang di produksi oleh Jepang sendiri. Vaksin tersebut akan lebih efektif apabila masyarakat tetap patuh pada proses yang telah ditetapkan masyarakat.

“Jumlah kasus akan terus meningkat apabila PPKM dihapuskan, maka disamping memprioritaskan proses Jepang juga mengatur aktifitas manusia agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan ekonomi”, ujar H.E Kenji Kanasugi.

Terkait dengan sistem kesehatan Indonesia, Jepang siap membantu untuk meningkatkan kapasitas kesehatan melalui JICA.

“Lebih dari 9.000 tenaga kesehatan telah berpartisipasi dalam seminar tersebut”, ucap H.E Kenji Kanasugi

Tidak hanya itu, Jepang turut serta menyediakan pinjaman berbunga ringan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen Jepang untuk membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.



**H.E KENJI KANASUGI**  
Duta Besar Jepang

“Jepang dan Indonesia saling mendukung satu sama lain, Jepang juga berkontribusi terhadap alat-alat kesehatan untuk diberikan pada pemerintah Indonesia. Distribusi vaksin kami pastikan sampai ke negara berkembang khususnya Indonesia”

Selanjutnya, Jepang menjadi tuan rumah olimpiade dan paraolimpiade, dan terjadi peningkatan kasus positif COVID-19.

Oleh sebab itu, Jepang tetap berusaha untuk mencari

solusi dengan berbagai praktik dan kerjasama internasional. Seperti, menciptakan buku atau pedoman kesehatan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Peringatan HUT ke-76 TNI, Wakil Ketua Komisi I FPKS: TNI Bersatu dan Berjuang untuk Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (05/10) --- TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 hari ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan TNI lahir dari rakyat

karena itu, kehadiran TNI harus benar-benar dirasakan rakyat. Kharis mengatakan HUT TNI yang ke-76 ini adalah masa yang tepat untuk Indonesia, bersatu, berjuang bersama rakyat bangkit dari keterpurukan pandemi Covid-19 dan memenangkan segala ancaman dari luar terhadap kedaulatan NKRI.

Termasuk juga TNI untuk saling bahu-membahu dalam kerangka profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) TNI.

"Tema peringatan HUT ke-76 TNI pada 2021 adalah "Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang" ini momentum untuk kita bersama bahwa kemenangan kita melawan pandemi dan

menjaga kedaulatan NKRI dapat tercapai jika kita semua elemen anak bangsa bersatu dan bersama-sama berjuang tidak sendiri-sendiri agar tujuan tercapai yaitu kebaikan untuk NKRI," ujar Kharis dalam keterangan persnya kepada media, Selasa (05/10).

Kharis mengapresiasi kesungguhan dan keseriusan sinergi TNI dengan berbagai elemen bangsa. Salah satunya upaya TNI dalam membantu Pemerintah dan rakyat melawan dan memutus persebaran pandemi Covid-19.

"TNI bersama Polri, ASN, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan menjaga, mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan bahkan ratusan rumah sakit militer, ribuan tenaga medis

militer juga diterjunkan inilah yang dimaksud manunggal TNI bersama rakyat," kata Kharis.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga menyoroti kesejahteraan prajurit, yang juga menjadi bagian penting untuk terus ditingkatkan. Karena itu, Kharis memandang harus bersinergi dan seimbang antara profesionalisme dan kesejahteraan seperti dua sisi dari mata uang.

"Sulit menuju kemenangan kalau TNI yang profesional diabaikan aspek kesejahterannya, karena itu DPR terus berupa agar jaminan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI Ke-76. Kami dan rakyat Indonesia mendoakan agar TNI menjadi semakin profesional, tangguh, dan kita semua bisa melewati dan melalui dengan selamat pandemi ini, "Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang," tandas Legislator dapil Jawa Tengah V itu.



**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Tema peringatan HUT ke-76 TNI pada 2021 adalah "Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang" ini momentum untuk kita bersama bahwa kemenangan kita melawan pandemi dan menjaga kedaulatan NKRI dapat tercapai jika kita semua elemen anak bangsa bersatu dan bersama-sama berjuang tidak sendiri-sendiri agar tujuan tercapai yaitu kebaikan untuk NKRI,"

# Kasus Pinjaman Online Marak, Wakil Ketua FPKS: Perlu Diselesaikan dari Hulu

## ● KUTIPAN

Jakarta (16/10) --- Banyak kasus pinjaman online (pinjol) / peer to peer lending ilegal yang memakan korban masyarakat. Pihak Polri melakukan penggrebekan seperti yang terjadi di Sleman, Yogyakarta.

Kementerian Kominfo juga sejak 2018 telah memblokir (memutus akses) 4.873 konten fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, melalui telepon seluler menyatakan, pihaknya mengapresiasi kesigapan pemerintah memberantas pinjol ilegal.

"Saya apresiasi kesigapan pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Kominfo juga sejak 2018 telah memblokir (memutus akses) 4.873 konten fintech dan aplikasi-aplikasi fintech ilegal yang banyak memakan korban masyarakat. Saya juga mendorong pemerintah agar terus menegakkan hukum. Tapi tindakan pemberantasan di hilir seperti ini belum cukup, kita juga perlu selesaikan pokok masalahnya di hulu."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan aspek kasus ini. Pertama, aspek masyarakat. Ada kebutuhan dari masyarakat terhadap pinjaman.

"Kebutuhan disini ada yang memang benar-benar kebutuhan, sudah kepepet karena terdampak pandemi, ada juga yang butuh karena konsumtif. Mereka ditolak pengajuannya oleh Pinjol ilegal atau bank resmi yang memang memiliki persyaratan yang ketat. Lalu mereka tergiur oleh Pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman mampu menarik banyak masyarakat, meskipun bunganya mencekik. Lintah darat versi online," pungkasnya.

Karenanya, lanjut Sukamta, masyarakat harus mengemeri diri untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu, jika

pada akhirnya terlibat dengan pinjol ilegal ini. Lebih baik tidak membeli kebutuhan sekunder atau tersier, daripada terjebak pinjol.

"Lebih baik menghindari riba karena membuat sengsara. Jika memang benar-benar butuh, ya tentunya perlu pengelolaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan menyicil pinjol. Ini literasi keuangan," terang Sukamta.

Selain itu, imbuhnya, perlu juga masyarakat memahami literasi digital di bidang fintech ini. Teknologi seperti apa yang digunakan pinjol, agreement dan permission apa saja yang dipersyaratkan oleh pinjol terhadap nasabahnya.

"Masyarakat harus pintar dan berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjol. Edukasi kepada masyarakat ini menjadi tugas kita bersama. Selama ini sudah berjalan, di antaranya lewat program Kementerian Kominfo, tapi perlu digalakkan lagi," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"Saya apresiasi kesigapan pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Kominfo juga sejak 2018 telah memblokir (memutus akses) 4.873 konten fintech dan aplikasi-aplikasi fintech ilegal yang banyak memakan korban masyarakat. Saya juga mendorong pemerintah agar terus menegakkan hukum. Tapi tindakan pemberantasan di hilir seperti ini belum cukup, kita juga perlu selesaikan pokok masalahnya di hulu."

# Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024, Aleg PKS Tegaskan Presiden Jokowi Sebaiknya Ikut KPU

## KUTIPAN

Mardani mengingatkan agar berhati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada, hingga verifikasinya.

Jakarta (09/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang kembali ditunda diputuskan oleh pihak pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu.

Menurut Mardani, persoalan belum diputuskannya jadwal Pemilu ini lantaran munculnya usulan jadwal pelaksanaan Pemilu pada tanggal 15 Mei 2024.

"Ops Pemerintah itu sebenarnya baik agar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya,"

ungkapnya.

Tapi, Anggota Komisi II ini menyarankan, baiknya, Presiden Jokowi mengikuti jadwal KPU, karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu berkualitas.

"Semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kelebihanannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu," ujar

Ketua DPP PKS ini.

Namun, imbuhnya, jika dilihat usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024.

"Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.

Mardani mengingatkan agar berhati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada, hingga verifikasinya.

"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 dan sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," pungkasnya.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**  
Anggota Komisi II DPR RI

“Semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kelebihanannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu,”

# Anggota FPKS Ingatkan BPN, Klaim Tanah Rakyat sebagai Wilayah Kehutanan Sangat Meresahkan

## KUTIPAN

Selain itu, sebagai evaluasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pelaksanaan Program Pemetaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pertanahan, Aus Hidayat Nur meminta Kementerian ATR / BPN segera menyelesaikan Sarana dan Prasarana seperti Kanwil dan Kantah yang saat ini tidak memiliki Kantor permanen di Sulawesi Utara.

Manado (13/10) — Dalam kunjungan kerja Komisi II (11/10/2021) ke Sulawesi Utara, Aus Hidayat Nur mengingatkan kepada BPN agar cepat mengantisipasi keresahan masyarakat karena klaim atas tanah-tanah rakyat sebagai wilayah kehutanan.

Bahkan lebih jauh lagi, hendaknya Presiden dan segenap mitra Komisi II seperti Kemensekkab dan Kemensekneb bisa menegeru Kementerian Lingkungan Hidup yang memasukkan tanah-tanah

itu sebagai wilayah kehutanan.

"Klaim tanah-tanah rakyat sebagai wilayah kehutanan sudah sangat meresahkan dan dapat menimbulkan konflik yang memprihatinkan," kata Politisi PKS ini saat bertemu Kanwil Pertanahan se-Sulawesi Utara di Hotel Luansa.

"Presiden, Kemensekkab atau Kemensekneb bisa menegeru Kementerian Lingkungan Hidup yang memasukkan tanah-tanah rakyat itu, bahkan sebagian pulau Bunaken ke dalam

wilayah kehutanan," tambahnya.

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan hal serupa yang sangat banyak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Bahkan di Ibukota Kaltara, Kabupaten Bulungan, kawasan yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan belum diizinkan dibangun," ujar Kang Aus, sapaan akrabnya.

Selain itu, sebagai evaluasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pelaksanaan Program Pemetaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pertanahan, Aus Hidayat Nur meminta Kementerian ATR / BPN segera menyelesaikan Sarana dan Prasarana seperti Kanwil dan Kantah yang saat ini tidak memiliki Kantor permanen di Sulawesi Utara.

"Termasuk di Kalimantan Utara agar diprioritaskan pembangunannya," ungkapnya.

Dan tentunya membenahi produk hukum dengan meningkatkan integritas para



## KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi II DPR RI

"Klaim tanah-tanah rakyat sebagai wilayah kehutanan sudah sangat meresahkan dan dapat menimbulkan konflik yang memprihatinkan, Presiden, Kemensekkab atau Kemensekneb bisa menegeru Kementerian Lingkungan Hidup yang memasukkan tanah-tanah rakyat itu, bahkan sebagian pulau Bunaken ke dalam wilayah kehutanan"

SDM pertanahan.

"Produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN sering menjadi masalah karena Kementerian ini dianggap tidak

berwibawa dan SDM-nya diindikasikan banyak yg terlibat permainan Mafia tanah, HGU, HPL," pesannya.

# Nasir: Keadilan Hukum Masih Berpihak Kepada HRS

## KUTIPAN

Jakarta (07/10) — Penolakan permohonan kasasi jaksa oleh Mahkamah Agung terkait pidana kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS), dinilai anggota Komisi Hukum DPR RI, Nasir Djamil, sebagai bukti bahwa hukum masih memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Penolakan ini dinilai akan membuka peluang bebasnya HRS dalam kasus kebohongan di RS Ummi Bogor.

Menurut Nasir, apa yang dialami oleh HRS dan sejumlah pengurus teras FPI lainnya, menunjukkan di mata penegak hukum, kedudukan hukum seorang warga negara belum tentu sama. “Hak diperlakukan sama di depan hukum, seolah-olah lumpuh saat hukum dilakukan oleh orang yang dekat dengan penguasa,” kata Nasir dalam siaran persnya, Rabu (6/10).

Lebih lanjut Nasir juga mengatakan, apa yang dialami

oleh HRS dalam kasus kerumunan, karena pelaksanaan pernikahan putrinya, cukup diberi sanksi berupa administrasi dan denda. Hal itu pun, kata dia, sudah dilaksanakan oleh HRS.

“Semoga penolakan upaya kasasi jaksa terkait kasus kerumunan HRS menjadi //best practice bagi majelis hakim lainnya yang mengadili soal tuduhan kebohongan HRS di RS Ummi Bogor,” kata dia.



**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

“Apa yang dialami oleh HRS dan sejumlah pengurus teras FPI lainnya, menunjukkan di mata penegak hukum, kedudukan hukum seorang warga negara belum tentu sama. “Hak diperlakukan sama di depan hukum, seolah-olah lumpuh saat hukum dilakukan oleh orang yang dekat dengan penguasa

# TARIF PPN DALAM RUU KUP NAIK, MASYARAKAT KIAN TERCEKIK



**PKS menolak rencana kenaikan tarif PPN yang menyulitkan rakyat dan melemahkan perekonomian nasional.**

## Alasan PKS MENOLAK kenaikan PPN

- Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11-12% akan **kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.**
- Padahal, sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri berupa konsumsi masyarakat.
- Kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga yang **melemahkan daya beli masyarakat.**



# Aleg PKS Minta Pemerintah **Berkomitmen** Tidak Impor Beras Hingga Dua Tahun Kedepan

**KUTIPAN**

Jakarta (12/10) — Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim oleh Pemerintah melalui kementerian pertanian mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi COVID-19 hingga Ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020, dan 2021 memiliki tren yang mirip, Akmal akan terus mengingatkan kepada pemerintah agar pegang komitmen tidak impor beras hingga dua tahun karena pemerintah sendiri yang mengklaim ketersediaan pangan cukup dan solid untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia.

"Saya menaruh harapan besar kepada kementerian pertanian khususnya, meskipun anggarannya telah berkurang lebih setengah dibanding dari tahun 2015 silam, namun begitu strategisnya sektor ini, menjadi harapan bangsa ini

seiring dengan kemampuan negara kita yang memiliki potensi besar sebagai penghasil pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia", tuturnya.

Akmal mengatakan, Pemerintah perlu evaluasi bahwa tahun 2021 ini masih ada importasi beras yang terjadi meski di rapat-rapat antara DPR dengan pemerintah termasuk Bulog, tidak ada importasi beras tahun 2021.

Kenyataannya, lanjut Akmal, berdasarkan data yang didapat Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai US\$ 18,5 juta atau setara dengan Rp266,4 Miliar.

"Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2021, realisasi nilai impor pada Juli mengalami

penurunan 38,6%, dimana nilai impor beras pada Juni 2021 mencapai US\$ 30,12 juta," ungkapnya.

Impor beras yang dilakukan Indonesia pada Juli 2021 terbanyak diimpor dari India dengan volume mencapai 29,52 ribu ton dengan nilai US\$ 12,2 juta. Disusul oleh Vietnam dengan volume impor sebesar 8.850 ton dengan nilai US\$ 4,4 juta.

"Selain India dan Vietnam, Indonesia juga melakukan impor beras dengan Thailand dengan volume sebanyak 2.150 ton dengan nilai US\$ 1,4 juta. Juga Pakistan dengan volume impor sebesar 1.000 ton dengan nilai US\$ 390.00," ujar Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengapresiasi cara pandang Menteri bahwa pertanian itu bukan cuma makanan. Akan tetapi pertanian itu merupakan lapangan kerja, pertanian adalah ekonomi dasar, pertanian adalah nutrisi yang berkaitan dengan tumbuh kembang, kesehatan, stunting, dan lain-lain.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya menaruh harapan besar kepada kementerian pertanian khususnya, meskipun anggarannya telah berkurang lebih setengah dibanding dari tahun 2015 silam, namun begitu strategisnya sektor ini, menjadi harapan bangsa ini seiring dengan kemampuan negara kita yang memiliki potensi besar sebagai penghasil pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia”

# PNBP Naik Nelayan Terjepit, Politisi PKS **Desak** Jokowi Batalan PP 85/2021

**KUTIPAN**

Jakarta (14/10) — Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet, menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan presiden Joko Widodo nomor 85 tahun 2021 terkait Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya tegaskan menolak PP nomor 85 tahun 2021 yang dikeluarkan presiden. Kalo tidak bisa membuat nelayan sejahtera, jangan malah membuat kebijakan yang hanya menambah beban penderitaan rakyat. Saya minta presiden untuk membatalkan PP tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan PP nomor 85 tahun 2021 mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tujuan dikeluarkannya PP ini adalah untuk memaksimalkan

potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bidang perikanan tangkap yang selama ini kontribusinya dianggap masih sangat kecil.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai produksi perikanan tangkap tahun 2020 berada pada kisaran Rp224 triliun. Sedangkan, 4 tahun sebelumnya masing-masing Rp219 triliun (2019), Rp210 triliun (2018), Rp197 triliun (2017), dan Rp122 triliun (2016). Realisasi PNBP pada tahun tahun tersebut tidak mencapai 1% dari nilai produksi perikanan pertahunnya.

Secara berturut-turut

PNBP perikanan tahun 2020 sebesar Rp600,4 miliar yang merupakan realisasi PNBP tertinggi sejak tahun 2016. Dengan rincian Rp521 miliar di 2019, Rp448 miliar (2018), Rp491 miliar (2017), dan Rp357 miliar (2016).

Kebijakan terkait PNBP tersebut mendapatkan respon beragam dari masyarakat khususnya nelayan. Para nelayan beranggapan bahwa kebijakan tersebut akan mengerek pungutan yang harus mereka keluarkan. Tidak tanggung-tanggung nilai kenaikannya hingga berkali lipat.

Politisi senior PKS ini mengatakan pungutan PNBP, KKP perlu lebih berhati-hati penerapannya. Pasalnya kenaikan target PNBP dipastikan akan menekan pendapatan nelayan kecil dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada kapal-perikanan.

"Saya meminta pemerintah dalam hal ini KKP untuk memperhatikan gejala terkait penerapan PP 85 ini di lapangan. Karena secara eksplisit kenaikan pungutan PNBP akan mendorong menurunnya pendapatan nelayan kecil dan ABK" pungkasnya.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Pungutan PNBP, KKP perlu lebih berhati-hati penerapannya. Pasalnya kenaikan target PNBP dipastikan akan menekan pendapatan nelayan kecil dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada kapal-kapal perikanan. Saya meminta pemerintah dalam hal ini KKP untuk memperhatikan gejala terkait penerapan PP 85 ini di lapangan. Karena secara eksplisit kenaikan pungutan PNBP akan mendorong menurunnya pendapatan nelayan kecil dan ABK"

# Aleg PKS Desak Tim Khusus KLHK Segera Bekerja **Selidiki** Pencemaran Laut Jakarta

## KUTIPAN

Jakarta (06/10) --- Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera merealisasikan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus pencemaran di laut Jakarta.

Setelah terbentuk, lanjut Hermanto, segera bekerja agar segera diketahui dengan pasti sumber utama pencemaran dan penanggulangannya.

"Hasil penelitian ahli menginfokan teluk Jakarta mengandung paracetamol konsentrasi tinggi. Ini harus segera ada aksi untuk menanggulanginya," ucap Hermanto menanggapi rencana KLHK yang akan membentuk tim khusus menyelidiki kasus pencemaran di laut Jakarta.

Tim khusus KLHK tersebut rencananya tidak hanya menyelidiki, tetapi juga merumuskan kebijakan baru untuk mengatur limbah

paracetamol yang termasuk emerging pollutant. Emerging pollutant atau emerging contaminants adalah bahan-bahan pencemar baru. Contoh emerging contaminants adalah produk farmasi, antibiotik, sampah plastik dan sebagainya.

KLHK, kata Hermanto, jangan terlalu lama beretorika. "Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika," ujar legislator dari FPKS DPR ini.

Lebih jauh Hermanto meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) tidak tinggal diam dalam masalah ini.

"Ditjen Gakkum LHK jangan hanya mengusut kejahatan kehutanan. Usut juga kasus pencemaran di laut Jakarta ini," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Kandungan Paracetamol di laut Jakarta menjadi sorotan usai muncul dalam penelitian Konsentrasi Tinggi Paracetamol di Wilayah Perairan Teluk Jakarta, Indonesia. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Wulan Koagouw, Zainal Arifin, dan sejumlah peneliti internasional lain menerbitkan penelitian tersebut dalam Jurnal Marine Pollution Bulletin, sciencedirect.com, pada Agustus 2021 lalu.

Konsentrasi tertinggi parasetamol ditemukan di Angke dengan kadar 610 nanogram per liter dan Ancol dengan 420 nano gram per liter.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Hasil penelitian ahli menginfokan teluk Jakarta mengandung paracetamol konsentrasi tinggi. Ini harus segera ada aksi untuk menanggulanginya. Ditjen Gakkum LHK jangan hanya mengusut kejahatan kehutanan. Usut juga kasus pencemaran di laut Jakarta ini,"

*Selamat Datang*

Ibu Dipl. Ing. Hj. **DIAH  
NURWITASARI,**  
MI. Pol

Semoga dapat memperkokoh  
Kinerja Fraksi PKS DPR RI  
sesuai visi dan misi dalam  
rangka Melayani Rakyat

Daerah Pemilihan :  
Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung  
dan Bandung Barat



## Landasan Pacu Amblas, **HNY Desak Kemenhub Segera Investigasi dan Mengoperasikan Lagi Bandara Samarinda**

**KUTIPAN**

Jakarta (06/10) --- Anggota DPR RI Dapil IV Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen), Hamid Noor Yasin (HNY) meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi penyebab terjadinya amblas pada landas pacu Bandara APT Pranoto ini.

Apakah penyebab amblasnya landas pacu tersebut akibat spesifikasi teknis yang dibawah standard atau karena pemeliharaan dan pelaksanaan berkesinambungan karena karena faktor-faktor lainnya. Permintaan Hamid terkait kabar amblasnya landas pacu bandara tersebut, Rabu, 6 Oktober 2021.

Hamid menyatakan Selasa, 5 Oktober 2021 telah terjadi kerusakan landasan pacu Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

Dampaknya bandara tersebut harus ditutup pengoperasiannya lebih awal. Kerusakan ini diketahui oleh

pilot Pesawat Batik Air ketika bergerak menuju landas pacu melalui landas hujung.

Pilot kemudian berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara serta petugas layanan darat untuk melakukan pengecekan yang kemudian terkonfirmasi adanya bagian yang amblas pada landas pacu. Hamid mengaku kaget mendengar hal tersebut.

"Bandara APT Pranoto ini sepertinya baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018", katanya.

Hamid menambahkan, berdasarkan data yang ada pengerjaan Bandara APT Pranoto Samarinda ini memang

tersendat-sendat. Menurut sejarahnya, ujar anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS ini, Bandara APT Pranoto sudah mulai direncanakan pada tahun 1987 dengan kegiatan survei untuk mencari lokasi pengganti bandara Temindung.

Lebih lanjut Hamid, menjelaskan dimana pembebasan lahan baru dilakukan pada tahun 1995/1996 yang dilanjutkan dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta pembuatan rencana induk oleh Ditjen Perhubungan Udara.

"Pengerjaannya sendiri dimulai pada tahun 2007 oleh Pemkot Samarinda, namun kemudian terhenti karena sengketa kontrak antara Pemkot dengan kontraktor pada tahun 2011. Sengketa ini berlanjut hingga tingkat kasasi dimana pada tahun 2013 Pemkot Samarinda dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut. Pengerjaan Bandara APT Pranoto kemudian diambil alih oleh Pemprov Kaltim dan dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat akhirnya

**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

"Jika pemeliharaan dan inspeksi dilakukan secara berkala, maka dengan kondisi pemakaian yang ada saat ini seharusnya kerusakan ini tidak terjadi karena pengoperasian bandara masih dibawah kapasitas maksimalnya"

Bandara ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2018 setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menerbitkan Sertifikat Bandar

Udara (SBU) pada 15 Mei 2018," tegas Hamid.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Desak Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Kepala Desa Daripada Beasiswa S3

## KUTIPAN

“Predator desa adalah realitas. Sementara belum ada payung hukum dana operasional desa. Maka agar program desa dapat berjalan, terpaksa mereka menggunakan koceknya sendiri. Kasihan kepala desa, kalau seperti ini terus,” sebut Toriq.

Tasikmalaya (12/10) — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) berencana memberikan peluang kepada kepala desa berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya hingga S3.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menganggap wacana beasiswa S3 untuk kepala desa berprestasi sah saja. Namun ada perkara yang lebih mendesak dari itu. Yakni meningkatkan kesejahteraan Kepala desa itu sendiri.

“Boleh saja memberikan beasiswa S3 untuk kepala desa berprestasi ke depannya. Namun untuk saat ini, meningkatkan kesejahteraannya, sebagai ujung tombak

pengelola desa dengan segala dinamikanya, jauh lebih mendesak,” sebut politisi PKS.

Menurut Toriq, gaji sebesar Rp.2,8 juta per bulan untuk seorang kepala desa di dapilnya sangatlah kecil. Tugas seorang kepala desa tidaklah mudah, tanggung jawab sebagai pemimpin di wilayahnya sangat berat.

“seorang kepala desa harus menyiapkan waktu 24 jam bagi pelayanan masyarakat, agar optimal. sebagai pemerintahan terkecil, kepala desa dan perangkatnya merupakan ujung tombak pekerjaan dan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten bahkan pusat,” tutur Toriq. Belum lagi, tambah Toriq

lagi, Adanya ‘predator desa’ berkedok oknum wartawan, LSM, organisasi kemasyarakatan yang memalak aparat desa. Dengan modus menawarkan jasa pendampingan struktural kepada kepala desa. Selain itu, pungutan liar oleh oknum yudisial dengan menawarkan program bimbingan teknis atau bimtek.

“Predator desa adalah realitas. Sementara belum ada payung hukum dana operasional desa. Maka agar program desa dapat berjalan, terpaksa mereka menggunakan koceknya sendiri. Kasihan kepala desa, kalau seperti ini terus,” sebut Toriq.

Oleh karenanya Toriq menilai, bentuk apresiasi yang paling tepat pada saat ini. Kemendes wajib merealisasikan payung hukum untuk dana operasional bagi Kepala Desa. Besarannya bisa berdasarkan tingkat prestasi masing-masing desa atau yang lainnya.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

“Gaji sebesar Rp.2,8 juta per bulan untuk seorang kepala desa di dapilnya sangatlah kecil. Tugas seorang kepala desa tidaklah mudah, tanggung jawab sebagai pemimpin di wilayahnya sangat berat. Seorang kepala desa harus menyiapkan waktu 24 jam bagi pelayanan masyarakat, agar optimal. sebagai pemerintahan terkecil, kepala desa dan perangkatnya merupakan ujung tombak pekerjaan dan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten bahkan pusat”

# Kunjungan Komisi V DPR RI, Aleg PKS: Banyak Catatan yang Harus Diselesaikan

## KUTIPAN

Pekanbaru (13/10) - Anggota Komisi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemrov Riau, Bupati/Walikota, Mitra Komisi V di Kediaman Gubernur Riau.

Kegiatan ini banyak memberikan catatan dan evaluasi atas pembangunan dan rencana pembangunan di Riau.

Beberapa catatan dari Anggota Komisi V dan Mitra Komisi V diantaranya, pertama terkait pembangunan Roro Dumai Melaka, menurut Perwakilan Dirjen Hubungan Laut, belum terlihat keseriusan pihak Malaysia dalam kerjasama ini.

Melihat kurang antusias ini, mereka akan menahan progres pembangunan Roro Dumai-Melaka ini hingga adanya kejelasan MoU dengan Pihak Melaka.

Kemudian ada juga persoalan status serah terima lahan dari pemerintah daerah ke pihak kementerian. Jika serah terima lahan ini selesai maka ada beberapa pembangunan yang dapat dikerjakan di tahun 2024.

Menanggapi hal ini, Gubernur Riau menyampaikan ke anggota Komisi V bahwa para kepala daerah telah menyiapkan anggaran untuk itu, namun belum direalisasikan. Dia berjanji dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah.

Kemudian dari mitra Komisi V menyortir masih adanya pembebasan lahan rusak tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum dibayarkan. Pada kasus ini, ada dua persoalan yang terjadi yaitu status lahan yang masih termasuk HPT dan juga adanya perbedaan harga yang mencolok. Sehingga beberapa ruas belum dapat dikerjakan.

Namun itu, pihak PT. Hutama Karya sebagai kontraktor menyatakan optimis ruas Pekanbaru-Bangkinang akan selesai pada akhir tahun 2021.

Gubernur Riau, Syamsuar, dalam kesempatan tersebut

menyampaikan beberapa usulan program untuk tahun 2022 yang telah diusulkan. Dia berharap usulan tersebut dapat terwujud.

"Semoga usulan-usulan ini dapat terwujud," harap Gubri.

Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa dia selalu menyampaikan posisi Riau dalam menambah pendapatan negara. Namun apa yang Riau dapatkan tidak sesuai dengan kontribusi yang diterima.

"Bahkan di Komisi V kita sepakat dan menyampaikan aspirasi bahwa jalan daerah dapat dibangun kementerian. Selama ini pembangunan dibatasi oleh pembatasan kewenangan. Ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten." tegasnya.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Syarifie Abdulah Alkadrie berharap pandemi segera berakhir sehingga pembangunan juga bisa dilaksanakan dengan normal.

"Terkait usulan dari pak gubernur tentu nanti akan kita lihat dan akan kita tidak lanjut," ujar Syarifie.

Ia juga mengatakan Kunter Komisi V DPR RI ke Provinsi



## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

"Saya selalu menyampaikan posisi Riau dalam menambah pendapatan negara. Namun apa yang Riau dapatkan tidak sesuai dengan kontribusi yang diterima. Bahkan di Komisi V kita sepakat dan menyampaikan aspirasi bahwa jalan daerah dapat dibangun kementerian. Selama ini pembangunan dibatasi oleh pembatasan kewenangan. Ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten

Riau dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, BMKG, serta

Basarnas.

"Selain itu juga menjawab aspirasi Pemerintah Provinsi Riau terkait pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya melalui APBN," tambahnya.

# Aleg PKS Soroti Penjualan Ruas Tol untuk Bayar Hutang yang Kian Membengkak

**KUTIPAN**

Lombok (11/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyoroti penjualan ruas tol Cibitung-Cilincing senilai Rp 2,44 triliun yang dilakukan kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (API).

Berdasarkan laporan keuangan Waskita pada akhir kuartal kedua, kata pria yang akrab disapa SJP, total utang perusahaan mencapai Rp 89,72 triliun, dimana sebesar Rp 48,55 triliun diantaranya merupakan kewajiban jangka pendek.

"Sementara itu dari aset perusahaan sebesar Rp 105,34, ternyata hanya Rp 33,54 triliun yang tercatat sebagai aset lancar dimana nilainya lebih kecil dari kewajiban jangka pendek perusahaan," terangnya.

Sehingga, ujarnya, akibat utang yang mengunung tersebut, kata SJP, Waskita terpaksa menjual sebagian kepemilikannya di beberapa ruas tol.

"Yang terbaru adalah penjualan saham di ruas tol

Cibitung-Cilincing senilai Rp 2,44 triliun yang dilakukan kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) selaku pemegang saham 45% dari jalan tol tersebut," ungkapnya.

Sebetulnya, kata SJP, penjualan kepemilikan saham di beberapa ruas tol bisa saja dilakukan, akan tetapi FPKS menyoroti besarnya utang BUMN Karya tersebut. Karena strategi menggenjot pembangunan infrastruktur menggunakan utang tentu bukan tanpa resiko.

"Dengan besarnya kewajiban jangka pendek akibat penugasan pembangunan infrastruktur tersebut, maka jika kemudian tidak berhasil menjual kepemilikan sahamnya, BUMN tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan dan

pada akhirnya harus ditolong melalui mekanisme PMN. Sehingga akhirnya membebani kas negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya," pungkasnya.

Fraksi PKS, kata SJP, berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah berhati-hati dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui penugasan BUMN yang pembiayaannya berbasis utang BUMN.

"Segala bentuk pembangunan berbasis utang harus memperhatikan tingkat pemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang dan skema pengembaliannya harus dibuat sesuai dengan skenario pemanfaatannya. Selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang matang berdasarkan hasil survei yang kredibel," ujarnya.

Sehingga, imbuh Suryadi, tidak terjadi kesalahan perhitungan yang menyebabkan terjadinya pembengkakan seperti yang telah terjadi pada proyek tol Cibitung-Cilincing dari semula diperkirakan sekitar Rp4,6T menjadi Rp10,8T ataupun seperti proyek Kereta Cepat yang semua diperkirakan melenan biaya Rp 80T tetapi kemudian membengkak



## H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Segala bentuk pembangunan berbasis utang harus memperhatikan tingkat pemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang dan skema pengembaliannya harus dibuat sesuai dengan skenario pemanfaatannya. Selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang matang berdasarkan hasil survei yang kredibel"

menjadi sekitar Rp 110T.

"Dengan perencanaan pembangunan dan pembiayaan yang matang diharapkan tidak

akan menjadi beban bagi anggaran belanja negara," tegas SJP mengakhiri.

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Bentuk Holding Perusahaan Pemerintah Bidang Wisata, Aleg PKS: Komisaris dan Direksi Harus Profesional

## KUTIPAN

Jakarta (10/10) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta Pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi pada PT Aviata Pariwisata Indonesia agar memperhatikan aspek kapasitas dan profesionalitas. Karena menurutnya, merupakan amanah Pasal 28 UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.

Nevi menguraikan, dari penyampaian Kementerian BUMN diketahui, bahwa Jajaran Komisaris dan Direksi PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) telah diputuskan oleh Menteri BUMN. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-336/MBU/10/2021 untuk jajaran direksi, dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021 untuk jajaran komisaris.

"Pengangkatan Dony Oskaria menjadi Dirut dan Triawan Munaf menjadi Komut PT Aviata Pariwisata Indonesia yang merupakan induk Holding BUMN Pariwisata harus dibuktikan

dengan prestasi yang ditorehkan dalam perusahaan plat merah itu. Peningkatan kinerja BUMN, harus dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan negara", tutur Anggota DPR RI dari Faksi PKS.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan, bahwa kinerja BUMN Pariwisata kedepannya mesti dapat menggenjot sektor pariwisata dengan tujuan Indonesia sebagai destinasi internasional. Tujuan wisatawan mesti dijaga merata ke seluruh Indonesia yang berpotensi besar menarik wisatawan sehingga tidak hanya wilayah tertentu juga memberi-

kan solusi untuk pariwisata terkoneksi dari sabang sampai mereuke dengan biaya murah.

Nevi menambahkan, koneksitas berbagai hal mesti dapat terealisasi karena Holding membawahi begitu besar perusahaan-perusahaan negara yang saling berhubungan. Seperti diketahui PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang akan memimpin Holding Pariwisata. Adapun BUMN yang tergabung dengan Holding Pariwisata antara lain: PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Saya meminta, jangan sampai Kementerian BUMN mengedepankan pertimbangan politis, bukan integritas dan profesionalitas. Karena potensi ini ada yang disebabkan pada UU BUMN saat ini,



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

**"Dalam RUU BUMN yang saat ini masih dalam proses meminta masukan dari pakar, pengangkatan Direksi dan Komisaris perlu dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan lewat mekanisme fit and proper test di DPR dan terbuka untuk publik"**

pengangkatan direksi dan komisaris BUMN dilakukan oleh Menteri BUMN", ujar Nevi.

Kedepannya, tambah Nevi, pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN yang dilakukan

Kementerian BUMN mesti ada payung hukum yang mengatur pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN dalam UU BUMN.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Desak Erick Thohir Tuntaskan Penanganan Korupsi di BUMN

## KUTIPAN

budaya korupsi di perusahaan BUMN sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan ratusan triliun karena pada akhirnya harus membail out (menalangi) kerugian melalui penyertaan modal negara.

Jakarta (12/10) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang akan memberantas korupsi di perusahaan BUMN.

Amin pun mendesak Erick me-realisasikan janjinya tersebut demi penegakan good corpo-rate governance (tata kelola) BUMN secara profesional.

Belum lama ini, Menteri Erick menengarai adanya korupsi di PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dan PT Krakatau Steel (Perse-ro). Beliauapun melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK. Di PTPN III misalnya, selaku induk holding perkebunan perusahaan pelat merah disebut memiliki utang hingga Rp43 triliun, sedangkan

di PT KS mencapai lebih dari 2 miliar dollar AS.

“Pak Erick jangan hanya gimmick, segera melakukan audit menyeluruh dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika terbukti ada korupsi, libatkan lembaga penegak hukum untuk menuntaskannya,” tegas Amin.

Amin mengatakan, budaya korupsi di perusahaan BUMN sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan ratusan triliun karena pada akhirnya harus membail out (menalangi) kerugian melalui penyertaan modal negara.

“Masifnya korupsi di perusahaan BUMN terindikasi dari banyaknya kasus hukum yang menjerat direksi BUMN. Dari sekitar 160 kasus hukum,

30% diantaranya sudah menjadi tersangka,” ungkapnya.

Menurut Amin, korupsi di BUMN secara umum disebabkan dua hal. Pertama, buruknya tata kelola (GCG) di perusahaan pelat merah.

“Kedua, BUMN terlalu digelayuti berbagai kepentingan politik dan perburuan rente yang membebani BUMN dengan proyek-proyek rugi dan tidak mendesak,” jelas Amin.

Dalam kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, Amin menengarai adanya campur tangan para pemburu rente termasuk mafia lahan yang membuat biaya menjadi super jumbo. Proyek ini tidak layak sejak awal, feasibility study-nya asal-asalan dan bakal merugikan negara cukup besar.

“Oleh karena itu kami menolak proyek ini dibiayai APBN. Selesaikan saja lewat mekanisme business to business (B to B) sesuai rencana awal agar tidak membebani keuangan negara,” pungkasnya.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Pak Erick jangan hanya gimmick, segera melakukan audit menyeluruh dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika terbukti ada korupsi, libatkan lembaga penegak hukum untuk menuntaskannya,”

# Terkait Pelantikan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Asal Politisasi Riset

## KUTIPAN

Jakarta (13/10) — Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/10), mengundang komentar beberapa kalangan.

Salah satunya adalah Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto yang menyebutkan pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang

lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," tegas Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaud jauh dengan BPIP," jelas Sesmenristek era

Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GI) semakin merosot.

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek 'kelembagaan' (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.

Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean.

Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenagakerjaan (ex BATAN) serta keantarkurhan (ex LAPAN).



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

Sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi

kelembagaan ini berjalan baik," tegas Mulyanto.

# Dorong RUU Bank Makanan Masuk Prolegnas Prioritas 2022, HNW Didukung Sejumlah Praktisi Terkait

## KUTIPAN

Jakarta (16/10) — Anggota Komisi VIII DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid saat reses mengadakan Focus Group Discussion bersama sejumlah praktisi lembaga Bank Makanan, dalam rangka menyerap aspirasi mereka terkait substansi dan urgensi dari RUU Bank Makanan.

Seluruh praktisi Bank Makanan yang hadir menyatakan sangat mendukung dorongan tersebut. Bahkan, melihat keperluan dan manfaatnya, mereka turut mendesak bahwa kehadiran RUU itu sudah masuk kategori harus.

Hidayat menyambut sangat baik aspirasi, dukungan dan kesepakatan mereka. Apalagi menurut Bappenas, masalah makanan ini juga sudah menjadi perhatian Pemerintah dan masuk dalam 5 sub-sektor prioritas Nasional.

Sebagai pengusul inisiatif RUU Bank Makanan di Baleg DPR-RI, HNW sapaan akrabnya mendorong agar RUU yang

sudah berada di Prolegnas long list 2020-2024 tersebut bisa masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022.

"Hal ini dalam rangka merealisasikan aspirasi Publik dalam memberikan dukungan legal terhadap Bank Makanan yang sudah berdiri dan aktif membantu masyarakat, serta memacu pendirian Bank Makanan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga bisa membantu warga dan pemerintah terdampak covid-19. Dukungan pada Bank Makanan juga bisa menjadi solusi atas permasalahan makanan berlebih sekaligus

tingginya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pangan antar penduduk, mengubah laku masyarakat yang boros dan mubazir, serta menguatkan komitmen gotongroyong dan kesetiakawanan Nasional," ungkap HNW.

Karena, imbuh HNW, Indonesia dengan jumlah warga miskin makin meningkat hingga 1,12 juta orang selama pandemi (data BPS), tapi dikenal sebagai Negara yangarganya boros/mubadzir dengan peringkat ke-2 sedunia sebagai penghasil limbah pangan (laporan The Economist).

Namun di waktu yang sama, kata HNW, Indonesia juga dikenal sebagai Negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Indeks yang dirilis oleh Charities Aid Foundation. Untuk itu dirinya mengajak para praktisi dan lembaga Bank Makanan untuk bersama-sama mendorong dan mengawal agar RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini bisa segera dibahas di DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

"Saya sebagai legislator



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Saya berharap dengan dukungan dari para praktisi ini RUU Bank Makanan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas, dan segera bisa dibahas dan diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah"

Fraksi PKS di DPR-RI berupaya memperjuangkan aspirasi Warga aktivis bank makanan, dengan mengajukan RUU yang memberikan payung hukum bagi para relawan dan lembaga Bank Makanan sebagai bentuk proteksi dan dukungan terhadap kegiatan Bank Makanan

yang bisa menjadi solusi bagi dua masalah sekaligus, yakni kelebihan pangan dan ketimpangan pangan," disampaikan Hidayat dalam acara FGD RUU Bank Makanan secara virtual, Jumat (15/10/2021).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Umrah Kembali Dibuka, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Beratkan Calon Jemaah Indonesia

**KUTIPAN**

Jakarta (10/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku bersyukur atas kabar dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan (prokes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penularan virus Covid-19.

"Itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya," ujar Bukhori di Jakarta, Minggu (10/10).

Anggota Komisi Agama DPR ini mengakui, penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi mem-

bawa konsekuensi terhadap pembengkakan biaya, salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jemaah apabila didapati ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan. Merespons hal itu,

menurut Bukhori, Pemerintah juga perlu menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya.

"Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina. Karena itu saya mendorong peran pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang

tidak memberatkan para jemaah kita," tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator DPR Jawa Tengah 1 ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jemaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci. Pasalnya, Bukhori menilai kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahannya kasus global masih terus terjadi.

"Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak meropotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai. Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi sekaligus memelihara keselamatan bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi calon jemaah asal Indonesia. Keterangan itu ia peroleh dari nota diplomatik yang disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada 8 Oktober 2021 silam.

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya."

# Anggota DPR Ingatkan Risma, Kalau Marah-marah Jangan ke Rakyat Kecil

## KUTIPAN

Jakarta (06/10) — Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) memarahi sambil mengancam menembak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fajar Sidik Napu, di Gorontalo, masih menuai sorotan.

Apalagi telah diklarifikasi oleh Fajar bahwa Risma ternyata mendapat informasi yang salah terkait data yang kemudian memicu amarah Mensos itu.

Anggota Komisi VIII —mitra Kemensos—, Iskan Qolba Lubis, mengaku sudah pernah mengingatkan Risma untuk mengubah perilakunya tersebut. Bukan sekali dua kali Risma melontarkan amarahnya di tengah publik saat kunjungan kerja.

Tetapi kepada Iskan, Risma menjawab bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari karakternya.

“Saya dulu pernah kritik Bu Risma, perilaku dia harus diubah. [Tapi] dia bilang, ‘ya ini masalah karakter saya’. Ya enggak bisa dong, harus disisihkan dengan jabatan. Atau kalau enggak dikonsultasikan

dulu ke dokter spesialis yang berhubungan dengan itu [karakter mudah marah],” kata Iskan, Senin (4/10).

“Kalau dibilang karakter, kan bisa diubah. Kalau seperti itu [terus] nanti bisa [berujung] kekerasan juga. Apalagi di negara ini kan orang bisa aja nuntut, kalau dia merasa dipermalukan di publik, boleh mereka minta ganti rugi,” imbuh politikus PKS itu.

Lebih lanjut, Iskan meminta Risma lebih bijak melihat dukung persoalan sebelum marah-marah. Ia pun berharap Risma dapat melemparkan amarahnya ke sosok yang lebih tepat.

“Apa kesalahannya, sebesar apa? Lagian kan bukan hanya kesalahan orang itu, pasti ada di atasnya dia. Dengan rakyat kecil jangan gitu.

Kalau mau marah, marah aja di DPR,” ujarnya.

“Tapi enggak berani juga dia berantem di DPR kan yang setingkat? Kalau orang di bawah itu orang merasa tertekan. Memang data Kemensos juga kacau, kan, bukan kesalahan mereka di bawah,” imbuh dia.

Selain itu, Iskan menilai Risma seharusnya bisa berbicara lebih lembut karena berasal dari Jawa. Apalagi kepada sosok bawahan yang belum tentu mendapat imbalan kerja yang ideal.

“Dia kan dari Jawa, yah, Mataram itu kan halus. Kalau kita lihat Suharto persaingannya dengan Sukarno saja gitu kan masih dianggap Bapak,” terang dia.

“[Lagipula] justru ke bawah itu kan perlu dia dekati, ‘apa kabar dek, apa ada masalah?’, biar mereka juga semangat. Apalagi misal gajinya [mereka] di bawah UMR, terus [tunjangan] transport-nya enggak ada. Jadi jangan mengharapkan [hasil] terlalu ideal juga,” tambahnya.

Iskan meminta Kemensos menyampaikan maaf terbuka terkait kesalahan informasi data yang menyebabkan



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

“Saya dulu pernah kritik Bu Risma, perilaku dia harus diubah. [Tapi] dia bilang, ‘ya ini masalah karakter saya’. Ya enggak bisa dong, harus disisihkan dengan jabatan. Atau kalau enggak dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis yang berhubungan dengan itu [karakter mudah marah],”

pendamping PKH tersebut ‘disemprom’ Risma di depan umum. Di sisi lain, ia berharap Risma dapat introspeksi diri, sementara Presiden Jokowi

menegur Mensos itu soal perilakunya yang kerap emosional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



#Tetap  
**Jaga  
Prokes**

Indonesia  
Mulai Membaik

**Terima Kasih**  
**#Nakes** Pahlawan  
Bangsa

# Jabar Pimpin Klasemen Medali PON XX Papua, Netty: Jaga Kemenangan dengan Tetap Prokes

## KUTIPAN

Jakarta (11/10) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani meminta pimpinan kontingen Jawa Barat ke PON XX Papua agar tetap menjaga kemenangan dan tetap disiplin prokes, testing dan tracing di tengah kemenangan pimpin klasemen sementara.

"Ditemukannya 43 kasus Covid-19 beberapa waktu lalu harus menjadi alarm bagi setiap kontingen, khususnya Jawa Barat, untuk disiplin prokes. Kita tidak ingin sportivitas dan semarak PON XX serta kebahagiaan Jawa Barat membahayakan Jawa Barat memimpin klasemen sementara ternodai karena atlet atau anggota delegasi ada yang terinfeksi," kata Netty dalam keterangan medianya, Senin (11/10).

Menurut politisi nasional asal Jawa Barat ini, pemerintah dan Satgas Covid-19 setempat harus sigap melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi kluster PON

XX Papua.

"Tingkatkan terus testing dan tracing dengan prioritas pemeriksaan pada atlet, ofisial, para petugas di stadium maupun hotel," katanya.

Menurut Netty, testing dan tracing adalah langkah prioritas yang harus dilakukan berkala oleh Satgas setempat. "Para atlet dan semua anggota kontingen harus bekerja sama dengan bersedia di-testing berulang kali demi keselamatan bersama," katanya.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, PON XX di Papua harus menjadi model penyelenggaraan event besar yang aman dan

membanggakan.

"Dunia internasional tentu ikut mengamati dan menilai. Indonesia harus memastikan mendapat poin positif di mata dunia, jangan malah mendapat celaan akibat lalai dan abai dalam penanganan Covid-19," katanya.

Netty juga meminta pemerintah melalui Satgas setempat agar para pasien Covid-19 ditangani dengan baik.

"Meskipun hanya memiliki gejala ringan, namun mereka harus tetap dirawat dan dipantau dengan baik. Jangan sampai bebas berkeliaran yang akan memicu penularan," ujarnya.

Terakhir, Netty meminta kontingen Jawa Barat agar tetap semangat, berjuang keras dan kembali ke tanah Pasundan dengan membawa gelar Juara PON XX.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Testing dan tracing adalah langkah prioritas yang harus dilakukan berkala oleh Satgas setempat. "Para atlet dan semua anggota kontingen harus bekerja sama dengan bersedia di-testing berulang kali demi keselamatan bersama"

# Selidiki Dugaan Pemeriksaan Anak di Luwu Timur, Aleg PKS: **Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat!**

## KUTIPAN

Jakarta (09/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menyoroti trending-nya tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial akibat dihentikannya kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.

"Saya mendorong pihak kepolisian Luwu Timur agar membuka kembali penyelidikan terhadap kasus kejahatan seksual ini secara transparan. Apalagi korbannya anak-anak dan terduga pelaku adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman pada keluarga," kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (08/10).

Menurut Netty, trending-nya tagar tersebut menjadi bukti tercederainya kepercayaan rakyat terhadap lembaga kepolisian.

"Lanjutkan penyelidikan, jangan sampai mencederai rasa kepercayaan rakyat pada lembaga kepolisian," ujar Netty. Mengutip laporan investigasi yang dilakukan oleh media, menurut Netty, penanganan kasus tersebut menyisakan banyak pertanyaan.

"Misalnya, dalam prosesnya kurang melibatkan secara penuh kuasa hukum, orang tua, dan pendamping sosial korban. Fasilitas rumah aman, konseling, dan dukungan fasilitas lainnya pun kurang memadai," tambahnya.

Oleh sebab itu, menurut Netty, agar kasus ini tidak simpang siur, pihak aparat harus tegas dan berpihak pada korban yang memiliki hubungan personal dengan pelaku.

"Beri dukungan pada ibu korban yang berani melaporkan kasus ini, jangan malah diviktimisasi sebagai Ibu yang memiliki gangguan kejiwaan," katanya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan dan dukungan pada keluarga untuk membangun ketahanan keluarga.

"Beri akses dan dukungan pada keluarga agar tangguh dan berani melewati situasi kritis, termasuk saat terjadi kejahatan seksual atau KDRT," tutup Netty.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saya mendorong pihak kepolisian Luwu Timur agar membuka kembali penyelidikan terhadap kasus kejahatan seksual ini secara transparan. Apalagi korbannya anak-anak dan terduga pelaku adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman pada keluarga,"

# Anggota DPR Minta **Sanksi Tegas** Diberikan untuk Pelanggar Karantina Kesehatan

## KUTIPAN

Jakarta (15/10) — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta siapa pun yang melanggar aturan karantina kesehatan harus disanksi tegas, termasuk pihak-pihak yang membantu si pelanggar.

Hal tersebut disampaikan untuk merespons kabar selebgram Rachel Venny yang kabur dari karantina kesehatan di RSDC Wisma Atlet Pademangan dan dibantu oleh oknum anggota TNI.

"Siapa pun ketika sedang melakukan karantina kesehatan harus mengikuti prosedur dan tidak boleh kabur. Sekelas presiden pun seperti itu, karena protokol kesehatan sangat penting. Ke depannya, harus benar-benar diberikan sanksi tegas terhadap yang melanggar dan membantu kabur pun harus diberi teguran tegas. Mau itu TNI, Polri atau Satgas Covid-19 sekalipun," kata Alifudin saat dihubungi. Politisi PKS itu

mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa Covid-19 berbicara tentang kemanusiaan.

Oleh karena itu, berbagai aturan yang ada selama pandemi Covid-19 harus dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk aturan karantina kesehatan.

Kasus Rachel Venny, menurut Alifudin, menjadi contoh bahwa pelanggaran protokol kesehatan telah terjadi di tengah menurunnya kasus Covid-19.

"Sekarang Covid-19 sedang landai, dan belum sepenuhnya kembali pulih, tapi sudah ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang diatur," heran Alifudin.

Atas kasus kaburnya Rachel Venny itu, dia meminta

semua pihak belajar untuk menaati protokol kesehatan selama masa pandemi.

Menurutnya, protokol kesehatan merupakan kunci untuk bangsa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

"Maka kita semua harus belajar dari permasalahan ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kaburnya Rachel Venny dari karantina kesehatan di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara dibenarkan oleh Kodam Jaya selaku Kogasgabpad Covid-19.

Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya) Herwin BS mengatakan, selebgram itu kabur dibantu oleh oknum TNI yang bertugas di bagian pengamanan Satgas Covid-19 bandara.

"Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat temuan bahwa adanya oknum anggota TNI bagian pengamanan Satgas di bandara yang melakukan tindakan non-prosedural," kata Kapendam dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/10/2021).

Menurut dia, anggota TNI



**H. ALIFUDIN, S.E., M.M.**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Siapa pun ketika sedang melakukan karantina kesehatan harus mengikuti prosedur dan tidak boleh kabur. Sekelas presiden pun seperti itu, karena protokol kesehatan untuk semua. Ke depannya, harus benar-benar diberikan sanksi tegas terhadap yang melanggar dan membantu kabur pun harus diberi teguran tegas. Mau itu TNI, Polri atau Satgas Covid-19 sekalipun”

berinisiasi FS itu mengutar agar Rachel Venny dapat menghindari prosedur

pelaksanaan karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri.

Kuota PBI BPJS Kesehatan Masih 9,7 Juta

## Aleg PKS: Segera Penuhi, Kondisi Rakyat Makin Sulit

### KUTIPAN

Jakarta (19/10) — Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih tersisa 9,7 juta usai Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus 9 jutaan data PBI BPJS.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar segera dilakukan pemenuhan kuota 9,7 juta dengan pembiayaan dari APBN sebab selain amanat konstitusi juga keadaan masyarakat semakin terhipnotis.

Mufida menyebut, angka penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta atau naik 0,36 persen dibanding Maret 2020.

Peningkatan penduduk miskin terjadi di kota dan desa. Tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen.

"Angka pengangguran terbuka juga meningkat. Termasuk meningkatnya PHK ditandai meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua BPJS Kesehatan pada Agustus 2021 yang didominasi

PHK pada usia produktif. Angka-angka ini menunjukkan tekanan ekonomi ke masyarakat itu nyata dan mereka butuh jaring pengaman sosial salah satunya PBI BPJS Kesehatan," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).

Mufida menekankan, Pemerintah Pusat bersama Pemda melakukan pendataan keluarga dalam rangka updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengingat banyak keluarga pra sejahtera akibat pandemi yang berkepanjangan ini.

"Penduduk miskin baru ini berasal dari keluarga yang kehilangan tulang punggung pencari nafkah yang wafat karena pandemi, penduduk yang mengalami sakit berkepanjangan maupun penduduk yang kehilangan pekerjaan/mata pencaharian maupun berkurang pendapatan secara tajam akibat pandemi yang mengharuskan

dilakukannya pembatasan berbagai kegiatan," ujar dia.

Mufida meminta agar pemerintah segera melakukan pendataan kembali kondisi keluarga akibat pandemi covid-19 untuk mendata keluarga miskin baru maupun keluarga tidak mampu yang sebelumnya juga belum terdata sebagai PBI BPJS.

Apalagi beberapa daerah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran (PBI) kelas 3 dalam rangka program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemda.

"Kondisi pandemi yang sudah mulai mereda harus dimanfaatkan masyarakat khususnya yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik dan penyakit lama/riwayat penyakit untuk kembali mendatangi faskes-faskes terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Pada saat yang sama, Faskes seperti Puskesmas bersama Dinas Kesehatan di daerah perlu kembali menggiatkan program preventif-promotif dan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat," papar dia.

Anggota DPR Dapil Jakarta II ini mengingatkan, permasalahan BPJS Kesehatan selama ini



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Kondisi pandemi yang sudah mulai mereda harus dimanfaatkan masyarakat khususnya yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik dan penyakit lama/riwayat penyakit untuk kembali mendatangi faskes-faskes terdekat untuk memeriksakan kesehatan.

Pada saat yang sama, Faskes seperti Puskesmas bersama Dinas Kesehatan di daerah perlu kembali menggiatkan program preventif-promotif dan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat"

selalu terkait data yang seringkali muncul sengkaret serta pembayaran klaim ke RS terutama RSUD dan RS swasta kecil.

"Dua hal ini perlu menjadi fokus pembenahan BPJS sekaligus juga memperbaiki

tata kelola keuangannya, termasuk masalah fraud yang masih sering muncul. Persiapan pasca pandemi perlu difokuskan pada kedua hal tersebut," ujar dia.

# Nilai-Nilai Ekonomi Syariah bersifat Universal

## Aleg PKS: Sejalan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

### KUTIPAN

Jakarta (18/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah, yang merupakan bagian dari rangkaian acara Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021.

Acara ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) yang berkerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Acara ini juga dihadiri oleh Astera Primanto Bhakti, selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), para narasumber, dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Nurul Huda selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, memaparkan tentang Rancangan Undang-Undang

(RUU) Ekonomi Syariah yang menjadi jawaban permasalahan dan solusi ekonomi di Indonesia.

Anis juga menambahkan bahwa RUU Ekonomi Syariah yang komperhensif dan implementatif dapat meningkatkan ekonomi nasional, maka masuknya RUU Ekonomi Syariah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas menjadi urgen.

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, perkembangan Ekonomi Syariah yang cepat, membutuhkan pengembangan dasar hukum agar dapat

menjadi landasan pengaturan yang ajeg dan dapat membentuk ekosistem yang sehat, sehingga berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

"Proses pembentukan UU merupakan proses yang terkait dengan substansi dan proses yang terkait dengan politik, sehingga keduanya harus dijalankan secara baik agar sebuah RUU yang diusulkan dapat terbentuk", tegasnya.

Anis juga menekankan bahwa, Ekonomi Syariah bisa menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi bangsa, karena nilai-nilai Ekonomi Syariah bersifat Universal atau Rahmatan Lil 'Aalamin.

"Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat Indonesia yang sejalan dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika", tandasnya.

Menutup pemaparannya, Anis Byarwati menyampaikan bahwa RUU Ekonomi Syariah yang sudah masuk long list



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

“Ekonomi Syariah bisa menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ekonomi bangsa, karena nilai-nilai Ekonomi Syariah bersifat Universal atau Rahmatan Lil 'Aalamin. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat Indonesia yang sejalan dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika”

Prolegnas 2022 harus sama-sama kita perjuangkan.

"Berjalan secara beringan bersamaan dengan para stakeholder, dan harus mempunyai komitmen yang

tinggi agar bisa sampai pada terbentuknya RUU tersebut, untuk itu kami memohon doanya agar seluruh proses panjangnya mendapatkan kemudahan", pungkasnya.



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Politisi PKS: Revisi UU BUMN Pijakan Strategis Perbaiki Kinerjanya

## KUTIPAN

Jakarta (08/10) --- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah menggodok RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Amin Ak. mengungkapkan, revisi UU BUMN harus mampu menciptakan ekosistem yang mendorong perbaikan kinerja BUMN yang sampai saat ini masih jauh dari harapan.

Amin mengatakan, kinerja perusahaan BUMN saat ini tengah menurun baik secara produktivitas, efisiensi hingga kemampuan mendorong profitabilitas. Oleh karena itu Revisi UU BUMN adalah momentum penting dan strategis untuk mendorong perbaikan struktural sehingga kinerja profitabilitas bisa meningkat.

"Revisi UU BUMN harus menjadi pondasi untuk mereformasi perusahaan milik negara dengan tujuan meningkatkan daya saing BUMN dan

mengubahnya menjadi perusahaan kelas dunia," ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi VI itu mengatakan, reformasi BUMN dibutuhkan untuk memenuhi harapan rakyat terhadap keberadaan BUMN. Pertama, BUMN harus memperbesar kontribusinya sebagai sumber fiskal perekonomian nasional sebagai salah satu sumber pendapatan negara, baik kontribusinya dalam bentuk pajak maupun dividen.

"Kedua, BUMN harus memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan menjadi sandaran bagi kebangkitan perekonomian rakyat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ketiga, imbuhnya, BUMN harus mengedepankan persai-

ngan sehat dan tidak menghambat pertumbuhan entitas bisnis swasta serta tidak bergerak ke arah state capitalism.

"Menghadapi penurunan kinerja BUMN, reformasi menitikberatkan pada modernisasi tata kelola perusahaan, peningkatan pengawasan aset negara, dan restrukturisasi BUMN termasuk menghapus perusahaan zombie. Investasi dari luar dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitas BUMN, namun pada saat yang sama, kepemilikan negara terhadap BUMN tetap dijaga sebagai andalan perekonomian

Menurut Amin, Indonesia bisa belajar dari reformasi BUMN yang dilakukan China yang pada tahun 2003 membentuk State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC), badan negara yang mengelola BUMN yang bergerak di sektor riil. Sedangkan perusahaan yang berskala kecil dan menengah dikelola oleh Daerah.

"China berhasil mereformasi BUMN mereka untuk menjadi lebih efisien, memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat, dan menjadi pemain kelas dunia," ujarnya.

SASAC menjadi poin penting dalam pengelolaan BUMN sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa menonjol khususnya dalam dunia internasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengambil



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI

**"Penerapan good governance dan sumber daya manusia yang andal tersebut mempercepat transfer teknologi dari negara-negara maju sehingga kualitas BUMN pun meningkat,"**

profesional untuk mengelola SASAC, yang bersumber dari diaspora China yang berpengalaman di Amerika dan Eropa.

"Penerapan good governance dan sumber daya manusia yang andal tersebut mempercepat transfer teknologi dari negara-negara maju sehingga kualitas BUMN pun meningkat," kata Amin.

Amin pun kembali

menekankan pentingnya memperkuat pasal-pasal mengenai pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jangan sampai ada celah bagi berulangnya kasus di BUMN yang merugikan negara yang ummunya disebabkan moral hazard pengelolanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota DPR Soroti Independensi Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019

## KUTIPAN

Jakarta (06/10) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori memberi sejumlah catatan penting dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, salah satunya terkait persoalan independensi pesantren.

Menurutnya jati diri pesantren harus dijaga, hal ini berarti jangan sampai adanya intervensi dari pihak-pihak lain di luar pesantren.

"Persoalan yang paling substansial itu adalah tentang independensi Ponpes dalam membangun karakter dan jati diri pesantren," ungkap Bukhori, usai mendengar sejumlah masukan dan respon dari para kyai dan sejumlah pihak pesantren menyikapi implementasi UU Pesantren, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).

Dari sejumlah masukan yang dihimpun, terungkap pihak pesantren sangat menghendaki untuk dilakukannya revisi atau perbaikan terhadap UU Pesantren tersebut sesuai

dengan masukan-masukan yang sudah dihimpun.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mendukung agar revisi terhadap UU bisa terealisasi dan mengusulkan adanya kajian lebih dalam terkait dengan UU tentang Pesantren tersebut agar sesuai marwah dari pesantren.

"Saya mengusulkan supaya ada kajian lebih dalam terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini. Misalnya pun ada perbaikan-perbaikan saya usul bisa cukup didistribusikan ke PP. UU-nya sudah ada bisa berlaku, tapi tidak menutup kemungkinan ada perbaikan ke depan, dan dalam menjalankannya itu harus sesuai dengan jiwa dan usulan para kyai dan para pengasuh Ponpes," ungkapnya.

Untuk itu dari perbaikan

terhadap UU Pesantren nantinya, Bukhori berharap pesantren bisa lebih kokoh dan diakui oleh negara terkait peran daripada pesantren itu sendiri.

"Karena seperti yang kita tahu peran pesantren lebih besar dan lebih kontributif terhadap negara, serta menjadi kawah untuk mendidik anak bangsa kita menjadi calon-calon daripada pemimpin serta berkontribusi terhadap negara di waktu yang akan datang," tuturnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, pihak dari pondok pesantren Riyadlul mendesak agar pemerintah menunda pemberlakuan UU Pesantren berikut seluruh aturannya untuk kemudian dilakukan pembahasan ulang secara utuh dan menyeluruh melibatkan pesantren-pesantren selaku pihak yang menjadi objek pemberlakuan UU pesantren. Untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap UU Pesantren berdasarkan kajian yang telah memperhatikan keseluruhan aspek kepentingan, aspirasi, kehendak, dan arah kebijakan yang mengadopsi nilai dan norma yang berlaku di



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Saya mengusulkan supaya ada kajian lebih dalam terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini.

Misalnya pun ada perbaikan-perbaikan saya usul bisa cukup didistribusikan ke PP. UU-nya sudah ada bisa berlaku, tapi tidak menutup kemungkinan ada perbaikan ke depan, dan dalam menjalankannya itu harus sesuai dengan jiwa dan usulan para kyai dan para pengasuh Ponpes"

lingkungan pesantren.

"Secara formal dan materiil UU Pesantren tidak memperhatikan dan mempertimbangan keseluruhan aspek kepentingan, aspirasi, kehendak, dan

arah kebijakan yang mengadopsi nilai dan norma yang berlaku di lingkungan pesantren.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

# Serap Aspirasi di Ponpes Jatim, Aleg PKS Soroti Isu Independensi Pesantren dalam UU Pesantren

## KUTIPAN

Surabaya (07/10) — Anggota Komisi Agama DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memberi catatan penting terkait penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yakni terkait persoalan independensi pesantren.

Menurutnya jati diri pesantren harus dijaga, salah satunya dengan mengantisipasi masuknya intervensi terhadap pesantren yang datang dari pihak-pihak lain di luar pesantren.

“Persoalan yang paling substansial itu adalah tentang independensi pondok pesantren (ponpes) dalam membangun karakter dan jati diri pesantren,” ucap Bukhori, usai mendengar sejumlah masukan dan respons dari para kiai dan pengurus pesantren menyikapi implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR

RI ke Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).

Dari sejumlah masukan yang dia himpun, terungkap pihak pesantren sangat menghendaki dilakukannya revisi terhadap UU Pesantren sesuai dengan masukan-masukan yang sudah diperoleh.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mendukung agar revisi terhadap UU Pesantren bisa terealisasi dan mengusulkan adanya kajian lebih mendalam terkait dengan UU Pesantren tersebut agar sesuai dengan marwah dari pesantren.

“Saya mengusulkan supaya ada kajian lebih dalam

terkait dengan UU Pesantren ini. Pun misalnya ada sejumlah masukan untuk perbaikan, saya usulkan agar cukup diakomodir melalui produk hukum Peraturan Pemerintah (PP),” jelasnya.

Undang-undangnya, demikian Bukhori melanjutkan, sudah ada dan berlaku, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada perbaikan ke depan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penerapan UU Pesantren harus sejalan dengan jiwa dan usulan para kiai dan pengasuh ponpes.

Lebih lanjut, anggota Komisi VIII DPR ini berharap pesantren bisa lebih kokoh dan diakui oleh negara atas peran dan sumbangsinya dalam menderdaskan kehidupan bangsa.

“Seperti yang kita ketahui, peran pesantren begitu besar dan kontributif terhadap negara melalui kiprahnya dalam mendidik anak bangsa kita untuk menjadi calon pemimpin yang akan mengisi ruang kontribusi di masa mendatang,” ujarnya  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Seperti yang kita ketahui, peran pesantren begitu besar dan kontributif terhadap negara melalui kiprahnya dalam mendidik anak bangsa kita untuk menjadi calon pemimpin yang akan mengisi ruang kontribusi di masa mendatang”



PKS



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Sah! DPR Sepakat RUU HPP 2022 jadi UU, **PKS Berulah**

**KUTIPAN**

Jakarta (07/10) — Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP menjadi Undang-Undang.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menetapkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda rapat adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU HPP.

Setelah mendapatkan restu dari Komisi XI, draft RUU HPP naik ke rapat paripurna bersama sejumlah agenda pembahasan lainnya. Mayoritas fraksi di DPR menerima draf itu sehingga RUU HPP resmi akan menjadi undang-undang (UU).

"Apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Setuju," ujar Muhaimin dalam rapat paripurna, Kamis (7/10/2021).

Seketika saat Muhaimin menyebut setuju, Anggota

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menyatakan bahwa fraksinya menolak penetapan RUU HPP menjadi UU. Menurutnya, PKS tetap menjaga sikapnya seperti saat penetapan di Komisi XI.

"Fraksi PKS tetap dengan sikap seperti di tingkat pertama [menolak RUU HPP]," ujar Netty.

Meskipun begitu, Muhaimin melanjutkan pembahasan karena hanya satu fraksi yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU HPP menjadi UU. Setelah itu, para anggota dewan pun menetapkan pengesahan draf itu untuk menjadi UU.

"Saya menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang HPP dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Setuju," ujar Muhaimin.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Fraksi PKS tetap dengan sikap seperti di tingkat pertama [menolak RUU HPP],"

# PKS Interupsi Dukung Amnesti Saiful Mahdi, DPR Setujui Amnesti untuk Saiful Mahdi

## KUTIPAN

Jakarta (07/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menyoroti persoalan rencana pemberian amnesti dalam kasus Tindak Pidana UU ITE yang menjerat Saudara Saiful Mahdi, Dosen pada Universitas Syiah Kuala.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V, saat memberikan interupsi di Rapat Paripurna yang diselenggarakan, Kamis, (07/10).

"Kami dari Fraksi PKS akan menyampaikan tanggapan perihal permintaan Presiden untuk memberikan pertimbangan terhadap rencana pemberian amnesti dalam kasus Tindak Pidana UU ITE yang menjerat Saudara Saiful Mahdi, Dosen pada Universitas Syiah Kuala," ungkap Hamid.

Sehubungan dengan permintaan Presiden tersebut, Fraksi PKS menegaskan kembali pandangannya.

"Fraksi PKS mendukung sepenuhnya agar pemberian amnesti bagi saudara Saiful

Mahdi dapat disetujui dan segera diproses dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan, kebebasan dalam mimbar akademik harus dilindungi serta kebebasan dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik harus dipulihkan," tegas Anggota DPR Dapil Jateng ini.

Dalam konteks ini, ungkap Hamid, pemberian amnesti bagi saudara Saiful Mahdi merupakan jalan keluar yang perlu kita dukung bersama.

"Kasus yang menjerat Saudara Saiful Mahdi merupakan fenomena gunung es di Indonesia yang diakibatkan kelemahan dalam UU ITE baik substansi normanya maupun

penerapannya. Masih banyak kasus semacam "Saiful Mahdi" lainnya yang sedang maupun telah dipidana akibat pemberlakuan UU ITE," papar Hamid.

Pemerintah, imbuh Hamid, memang sudah berusaha mengurangi dampak over kriminalisasi dari UU ITE ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE (SKB UU ITE).

"Namun Fraksi PKS memandang keluarnya Peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam bentuk SKB 3 Menteri tersebut tidak memadai dalam mengatasi kelemahan dalam UU ITE. Over kriminalisasi dari UU ITE bukan semata disebabkan kesalahan dalam penerapan UU namun juga berakar pada kelemahan substansial dalam perumusan norma/delik dalam sejumlah pasal-pasal didalam UU ITE yang dalam penerapannya bertentangan dengan semangat kebebasan sipil dan demokrasi," terang Hamid.

Fraksi PKS, kata Hamid, menyambut baik masuknya UU ITE kedalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 untuk direvisi.



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

"Kasus yang menjerat Saudara Saiful Mahdi merupakan fenomena gunung es di Indonesia yang diakibatkan kelemahan dalam UU ITE baik substansi normanya maupun penerapannya. Masih banyak kasus semacam "Saiful Mahdi" lainnya yang sedang maupun telah dipidana akibat pemberlakuan UU ITE"

"Kami meminta agar pimpinan DPR segera memproses tahapan penyusunan dan pembahasan bagi RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dari pulau Padar Labuhan Bajo  
Nusa Tenggara Timur Anggota FPKS DPR RI  
Johan Rosihan mengucapkan :



**SELAMAT MEMPERINGATI**  
**SUMPAH PEMUDA**

28 OKTOBER 2021

Bersatu, Bangkit dan Tumbuh

# Aleg FPKS: Pemindahan Ibukota bukan Agenda Urgent

## KUTIPAN

Jakarta, (07/10), Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mengusulkan agar RUU terkait dengan pemindahan Ibukota dapat ditangguhkan terlebih dahulu.

Politisi PKS ini mengatakan, agenda Pemindahan ibukota masih belum urgent, sebab Indonesia sedang mengalami pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

“Sikap PKS sudah sangat jelas bahwa Indonesia seharusnya lebih berfokus pada masalah dan persoalan lainnya khususnya pandemi COVID-19” ujar Hamid Noor Yasin.

Selain itu, perpindahan Ibukota perlu dipertimbangkan kembali, mengingat anggaran yang akan dikeluarkan terbilang besar. Dan lebih baik dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan lainnya.

“Pemindahan Ibukota perlu dipertimbangkan kembali khususnya melihat dari angga-

ran yang akan dikeluarkan”, ujar Hamid Noor Yasin.

Selanjutnya, para anggota legislatif akan kembali kepada daerah pilihannya untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab konstitusional bagi saya selaku anggota DPR RI khususnya Jawa Tengah, Wonogiri, Sragen dan Karang Anyer”, Ungkap Hamid

Anggota Badan Legislatif ini menjelaskan, bahwa momen reses harus dimanfaatkan dengan baik sebab hal tersebut untuk menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan Fungsi Legislatif untuk melengkapi tugas pokok.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

“Perpindahan Ibukota perlu dipertimbangkan kembali, mengingat anggaran yang akan dikeluarkan terbilang besar. Dan lebih baik dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan lainnya. Pemindahan Ibukota perlu dipertimbangkan kembali khususnya melihat dari anggaran yang akan dikeluarkan”,

# Aleg FPKS: Solusi Program Kartu Tani Perbaikan dan dukungan Infrastruktur

## KUTIPAN

Jakarta (07/10) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan pandangan terkait dengan isu program kartu tani perlu untuk diselesaikan.

Politisi PKS menyampaikan bahwa Program Kartu Tani mengalami kendala dilapangan, mengingat program kartu tani sangat berkaitan dengan pupuk.

“Kendala program kartu tani dikarenakan adanya ketidakdaksiapan infrastruktur jaringan”, ujar Johan Rosihan

Selain itu, terhambatnya proses implementasi program kartu tani didasari oleh kesulitan yang dihadapi oleh para petani dalam memanfaatkan era digital saat ini.

“Para petani belum terbiasa dengan penggunaan kartu, bahkan ada yang kehilangan kartu ataupun lupa akan pin dari kartu mereka

sendiri”. Ujar Johan Rosihan.

Seperti yang diketahui publik, bahwa Program kartu tani berkait dengan para petani yang akan menebus pupuk sesuai dengan kuota subsidi yang mereka miliki.

“Di awal program kartu tani, dahil saya dijadikan pilot project program kartu tani” ujar Johan Rosihan

Anggota Legislasi PKS menyampaikan bahwa program kartu tani akan berjalan dengan lancar apabila memenuhi aspek-aspek yang akan membantu keberlangsungan dari program tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

“Terhambatnya proses implementasi program kartu tani didasari oleh kesulitan yang dihadapi oleh para petani dalam memanfaatkan era digital saat ini. Para petani belum terbiasa dengan penggunaan kartu, bahkan ada yang kehilangan kartu ataupun lupa akan pin dari kartu mereka sendiri”.

# Aleg FPKS : Masyarakat perlu tahu, Kebijakan Sektor Ketenagakerjaan dan Perlindungan Migran

## KUTIPAN

Jakarta (07/10) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi DPR RI, Netty Prasetyani Heryawan menyampaikan bahwa masa reses merupakan masa kerja di dapil dan bertemu dengan masyarakat pemilih, konstituen struktur partai dan pimpinan daerah.

“Kembali ke dapil untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan di masa sidang berikutnya”, ujar Netty.

Daerah Pilihan Jawa barat VIII dikenal sebagai daerah yang berbasis para pertanian dan kelautan, sehingga dalam masa reses anggota legislasi PKS akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap sektor ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja migran di luar negeri.

“Dapil Jabar banyak bermigrasi ke luar negeri yang tidak kalah penting dengan isu

pandemi”, Ujar Netty.

Isu pandemi juga menjadi perhatian khusus mengingat lalu lintas penerbangan sudah dibuka, lalu pembelajaran tatap muka juga sudah diperbolehkan

“Kelompok-kelompok tersebut menjadi rentan dan beresiko dari COVID-19”, Ujar Netty Prasetyani.

Masa reses menjadi momen untuk memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang mengalami PHK tanpa pesangon atau dirumahkan tanpa kompensasi. Selengkapnya di fraksi.pks.id



## Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

“Dapil Jabar banyak bermigrasi ke luar negeri yang tidak kalah penting dengan isu pandemi, Isu pandemi juga menjadi perhatian khusus mengingat lalu lintas penerbangan sudah dibuka, lalu pembelajaran tatap muka juga sudah diperbolehkan. Kelompok-kelompok tersebut menjadi rentan dan beresiko dari COVID-19”,



# LOMBA BACA KITAB KUNING<sup>®</sup> TINGKAT NASIONAL 2021

## KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab  
Fathul Mu'in Karya Syaikh  
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbarby

## SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2020)

## Raih Juaraanya Rebut Hadiyahnya

Juara 1	<b>UMRAH (Rp 30.000.000)</b>	Juara Harapan 1	<b>Rp 15.000.000,-</b>
Juara 2	<b>Rp 25.000.000,-</b>	Juara Harapan 2	<b>Rp 10.000.000,-</b>
Juara 3	<b>Rp 20.000.000,-</b>	Juara Harapan 3	<b>Rp 5.000.000,-</b>

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh  
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI



**HADIAH UTAMA  
UMRAH**

## PENDAFTARAN

Link Pendaftaran online:  
<https://bit.ly/lbkkvrtual2021fraksipks>

## AGENDA PELAKSANAAN

**Masa Pendaftaran**  
20 Oktober - 13 November 2021  
**Babak Penyisihan** di 34 Provinsi akan diselenggarakan antara 14 November 2021 bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.  
**Babak Final:** Rabu 8 Desember 2021

## NARAHUBUNG

0856-4554-6397 Agus. A. Wahid MG, Spd, M.Sc.  
0822-6062-1141 Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc.  
0813-2025-0848 Iman Sulaiman, Lc.  
0813-8642-7673 Dr. Suesilowati

## DEWAN JURI

**KH. Syuhada<sup>®</sup> Syarkun, S.Ag., M.HI.**  
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)  
**KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA**  
(Ketua Umum MAPADI)  
**Dr. KH. Ali Akhmad, MA, Al-Hafidz**  
(Ketua BPU-DPP PKS)



Habib **Dr. Salim** Segaf Aljufri, MA  
Ketua Majelis Syuro PKS



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI  
**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Cegah Penyebaran Covid-19, Anggota Komisi IX Berikan Bantuan Alat Swab Antigen

## KUTIPAN

Pontianak (06/10) — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Alifudin, menyalurkan bantuan 1000 alat rapid test antigen ke Klinik Kitamura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (4/11/2021).

Bantuan tersebut merupakan bantuan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI

Penyaluran alat rapid test disalurkan melalui Klinik Kitamura Kota Pontianak oleh Alifudin dan diterima langsung oleh Suriadi

“Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, agar masyarakat Pontianak yang membutuhkan bisa terfasilitasi. Kita patut bersyukur, Alhamdulillah bantuan ini juga diberikan dari Wakil Ketua Komisi IX Bapak Ansori Siregar untuk membantu selama pandemi Covid-19,” kata Alifudin.

Alat rapid test antigen tentunya akan sangat bermanfaat

untuk proteksi diri dan mengetahui seberapa banyak masyarakat sekitar Pontianak yang terdeteksi Virus Covid-19. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan dini atau melakukan swab PCR sebagai langkah selanjutnya.

Suriadi menyampaikan terimakasih kepada Alifudin atas kepeduliannya memberikan bantuan alat rapid test antigen gratis dimasa pandemi covid-19.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Alifudin. Mudah-mudahan dari bantuan ini, Covid 19 bisa segera berakhir.” Harap Suriadi.



**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

“Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, agar masyarakat Pontianak yang membutuhkan bisa terfasilitasi. Kita patut bersyukur, Alhamdulillah bantuan ini juga diberikan dari Wakil Ketua Komisi IX Bapak Ansori Siregar untuk membantu selama pandemi Covid-19,”

# Kunjungi Pidie, Rafli Salurkan Bantuan Menasah, Hingga Temui Petani Bawang

**KUTIPAN**

Kabupaten Sigli (19/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli menyalurkan bantuan untuk Menasah Desa Kampung Baroe, hingga temui langsung para petani bawang di Kecamatan Simpang Tiga dalam kunjungan kerja di Kabupaten Pidie, Aceh, Minggu (17/10/2021).

Kunjungan dalam rangka mengisi masa reses tersebut dioptimalkan politisi PKS Aceh itu, dengan cara mendatangi langsung masyarakat kalangan petani bawang Kecamatan Simpang Tiga yang sedang mengeluhkan kendala produktifitas akibat belum mendapatkan layanan listrik PLN.

Mengetahui kondisi demikian, Anggota Komisi VI Rafli, langsung menghubungi GM PLN Aceh di hadapan para petani.

"Kita melihat dan

mendengar keluhan para petani bawang di Simpang Tiga Pidie, terkait aliran listrik yang tidak tersedia, untuk itu kita langsung menghubungi GM PLN Aceh agar mengatasi persoalan ini, kita Video Call menghubungkan langsung antara GM PLN Aceh dan Para Petani," ujar Rafli.

Melengkapi kunjungan kemarin, Legislator yang juga seniman kondang di Aceh turut menghadiri perayaan Maulid di Masjid Teungku Chiek Di Pasie, Desa Blang Leuen, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.



**RAFLI**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I

"Kita melihat dan mendengar keluhan para petani bawang di Simpang Tiga Pidie, terkait aliran listrik yang tidak tersedia, untuk itu kita langsung menghubungi GM PLN Aceh agar mengatasi persoalan ini, kita Video Call menghubungkan langsung antara GM PLN Aceh dan Para Petani,"

# Masa Reses, Rofik Resmikan Ruang Kelas Baru Bantuan CSR di Banjarnegara

## KUTIPAN

Banjarnegara (13/10) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meresmikan ruang kelas baru SDIT Al Ihsan di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara pada Selasa (12/10).

Ruang kelas baru ini merupakan hasil bantuan program aspirasi berupa CSR senilai Rp. 100 juta kerjasama Komisi VII DPR RI dengan kementerian BUMN.

Selain SDIT Al Ihsan, bantuan CSR juga diserahkan kepada Yayasan Cahaya Insan Mulya Banjarnegara sebesar Rp 50 juta yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas MI Pelita Insan di Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja.

Konsultan Yayasan Ihsanul Amal Banjarnegara Doktor Tuswadi menyampaikan terima kasih kepada Rofik Hananto atas bantuan untuk SDIT Al Ihsan tersebut. Dia berharap ke depan SDIT Al Ihsan semakin maju.

"SDIT Al Ihsan ini berdiri tahun 2018. Dalam 2 tahun sekolah mendapatkan ijin

operasional dari Kemendikbud. Semoga masyarakat mendukung eksistensi SDIT Al Ihsan," katanya kegiatan yang dihadiri forkompincam Wanadadi tersebut.

Anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto mengapresiasi perkembangan SDIT Al Ihsan yang kini memiliki 154 siswa. "Hal ini patut diacungi jempol," kata Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah VII itu.

Rofik berharap bantuan CSR yang digunakan untuk membangun ruang kelas baru ini dapat menambah semangat para guru dan peserta didik dalam meningkatkan prestasi sekolah.

Meski sekolah ini lokasinya berada di tengah-tengah persawahan, tetapi prestasi sekolah ini luar biasa pesat perkembangannya, saya

berharap bantuan CSR yang digunakan untuk membangun ruang kelas baru ini dapat menambah semangat para guru dan peserta didik dalam meningkatkan prestasi sekolah." Kata Rofik

Dia juga mengajak masyarakat untuk bergerak lebih cepat. Indonesia harus bergerak lebih akseleratif sebab negara ini kaya SDA dan SDM. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di ranking 107 dari 189 negara di dunia.

"Indikator IPM ada 3 yaitu tingkat pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Untuk indeks lama sekolah kita baru 8,3 tahun. Artinya banyak yang belum lulus SMP sudah bekerja. Mereka bekerja dibayar murah karena pendidikan rendah," katanya.

Karena itu dia berharap SDIT Al Ihsan bisa mendidik anak-anak semakin banyak dan semakin luas jangkauannya.

"Mari kita syukuri apa yang sudah kita capai ini dan terus berusaha agar ke depan menjadi lebih baik lagi," katanya.

Dia menambahkan, pemberian bantuan program aspirasi ini tidak hanya untuk



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Meski sekolah ini lokasinya berada di tengah-tengah persawahan, tetapi prestasi sekolah ini luar biasa pesat perkembangannya, saya berharap bantuan CSR yang digunakan untuk membangun ruang kelas baru ini dapat menambah semangat para guru dan peserta didik dalam meningkatkan prestasi sekolah"

sekolah. Nantinya pelaku UMKK juga dapat. Bahkan tukang ojek juga akan

mendapatkan berupa helm berbahan baku alumni.

# Reses Hadiri Seminar Nasional, **Anis Byarwati** **Berpesan** pada **Generasi Muda**

**KUTIPAN**

Jakarta (13/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Gerakan Muda (GEMA) Keadilan DKI Jakarta secara virtual.

Acara yang diselenggarakan oleh Gema Keadilan DKI Jakarta dengan MPR RI mengambil tema 'Peran Pemuda dalam Mengokohkan Simpul Kebangsaan di Tengah Kemajemukan dan Pandemi' dan bertujuan untuk memperkuat semangat generasi muda untuk persatuan Indonesia'.

Pada kesempatan ini, anggota Komisi XI DPR RI ini, menyampaikan pesan pentingnya kepada seluruh pengurus.

"Dimana ada anak muda, di situ ada semangat, disitu ada harapan, untuk Indonesia menjadi lebih baik," tegasnya.

Seminar Nasional ini dihadiri juga oleh para tokoh

nasional lainnya yaitu Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, yang juga sebagai Keynote Speaker.

Serta beberapa tokoh muda sebagai panelis dan narasumber, yaitu Haris Pramata, selaku Ketua Umum DPP KNPI, Handi Risza selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina, dan Agus Ismail, yang merupakan Social Innovator.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Dimana ada anak muda, di situ ada semangat, disitu ada harapan, untuk Indonesia menjadi lebih baik,"

# Nur Azizah Beri Santunan Warga Korban Puting Beliung di Depok

## KUTIPAN

Depok – Ahad (3/10), Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. kunjungi warga Korban Puting Beliung yang terjadi di Depok pada ahad (26/9). Di wilayah kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari dan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah turut didampingi oleh sang suami, Prof. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc, serta Ketua DPC PKS Kecamatan Bojongsari dan Sawangan beserta pengurus dan pimpinan RT, RW serta Kelurahan. Nur Azizah beserta rombongan meninjau langsung serta menemui korban yang saat ini rumahnya sedang dalam tahap perbaikan pasca roboh diguncang angin puting beliung.

Muharram, ketua DPC Bojongsari mengucapkan terimakasih serta bersyukur atas kehadiran dan kepedulian Ibu Nur beserta para kader PKS yang senantiasa siaga disaat-

saat genting adanya bencana pekan lalu.

"Musibah yang terjadi di sini memang luar biasa, ada empat RW yang terdampak yaitu, di RW 01 ada 8 rumah, RW 03 ada 17 rumah, RW 18 ada 11 rumah, rw 19 ada 14 rumah. Alhamdulillah, kita PKS sudah banyak turun membantu, alhamdulillah banyak dari kader-kader PKS di daerah yang bahkan kondisinya masih ngontrak, tapi juga tetap mau berbagi sembako pada warga yang terkena bencana. Alhamdulillah kini kita juga punya ibu Nur Azizah, wakil rakyat kita yang juga sangat peduli pada warga di sini, ini merupakan bentuk cinta ibu

Nur Azizah pada warga pondok petir", ungkap Muharram.

Sementara itu Bachruddin, Sekretaris Kelurahan Pondok Petir, juga menuturkan ungkapan terimakasih kepada seluruh kader PKS yg sudah bekerjasama dengan RT dan RW serta kelurahan untuk turun membantu warga kelurahan pondok petir yg menjadi korban bencana.

"Warga kami pada tanggal 26 september yang lalu pada pukul 16.30 terkena musibah angin puting beliung di sini. Alhamdulillah berkat kerjasama para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat bersama para kader PKS, alhamdulillah pada saat ini banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga kami yang terdampak musibah, juga termasuk bahan material untuk perbaikan rumah-rumah yang rusak. Saat ini kami juga mendapat bantuan dari Ibu Nur Azizah, selaku aleg pusat. Terimakasih saya ucapkan" jelas Bacruddin.

Ia juga menambahkan, berdasarkan jumlah keseluruhan yang terdampak pihak kelurahan sudah mendaftarkan dan mensurvey berdasarkan laporan dari RT dan RW, saat ini sudah ada sekitar 129 warga Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari yang menjadi korban, dari mulai sedang, hingga rusak berat rumahnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Nur Azizah beserta rombongan meninjau langsung serta menemui korban yang saat ini rumahnya sedang dalam tahap perbaikan pasca roboh diguncang angin puting beliung.





### Profil

- Nama Lengkap  
**Hj. Nevi Zuairina**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Jakarta, 20 September 1965**
- Dapil  
**Sumatera Barat II**



### Pendidikan

- **SMAN 31 Jakarta Timur, DKI Jakarta**



### Riwayat Organisasi

- **Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, 2010-2021**
- **Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua P2TP2A (Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)**
- **Ketua Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim Prov. Sumatera Barat**
- **Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua Forum PAUD Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua Ikatan Istri Kepala Daerah DPP Partai PKS**
- **Ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIN) Prov. Sumatera Barat**
- **Ketua PW himpaudi Sumbar**
- **Ketua YKI sumbar ketua PPTI sumbar**



### Keluarga

- Suami : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. MSc**
- Anak : **3 Laki-Laki  
7 Perempuan**



### Riwayat Pekerjaan

- **Wiraswasta**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



### Media Sosial

- **f : Nevi Zuairina**
- **t : @nzairina**
- **ig : @nevizuairina**
- **g : https://nevizuairina.id/**

# NEVI ZUAIRINA

- **Ketua forum UMKM sumbar**
- **Ketua Forum PAUD Sumbar**
- **Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Sumatera Barat**
- **Ketua Forikan Prov. Sumatera Barat**
- **Wakil ketua kadin bidang UMKM**
- **Penasehat Bundo kuduang Sumbar**
- **Penasehat Dharma Wanita Persatuan Prov. Sumatera Barat**
- **Penasehat BKMT sumbar**
- **Penasehat BKOW**
- **HIRA Aisyiyah cabang tebet**
- **Penasehat bundo kuduang IKM**

# Reses, Nevi Silaturahmi ke Struktur PKS Kabupaten Pasaman Barat dan Bagikan Paket Sembako

## KUTIPAN

Pasaman Barat (17/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina dalam rangka reses masa persidangan I tahun sidang 2021 - 2022 membagikan paket sembako di beberapa titik di Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Lokasi pembagian Sembako yang dilakukan Nevi pada pekan pertama reses kali ini di sekitar kantor DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, Daerah Siligawan, Daerah Guo, Rumah tahfiz Ar Rahman Kecamatan Simpang, Sekitar kantor DPC PKS Batang Anai dan beberapa titik lainnya.

"Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyalurkan sembako di jumat sabtu pekan ini. Semogaa berkah untuk semua, dan yang paling penting silaturahmi kepada masyarakat tetap terjaga", tutur Nevi.

Reses DPR RI yang dimulai sejak pekan ini di bulan Oktober 2021, Nevi Zuairina langsung menuju daerah pemilihan

setelah melakukan kunjungan kerja komisi.

Hal ini merupakan jadwal yang telah ia susun dan di ajukan ke sekretariat DPR sebagai bagian dari menjalankan fungsi tugas DPR membina daerah pemilihan selain melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Nevi menyampaikan, pembagian sembako kepada warga di pasaman barat ini merupakan rangkaian pelantikan pengurus DPC dan taklim rutin pengurus ranting. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya untuk menguatkan basis masa dan kader PKS di Pasaman Barat.

"Untuk mendukung program pemerintah, selain

pembagian sembako, vaksin masal juga dilakukan selain kepada warga, juga kepada relawan PKS yang selama ini aktif membantu masyarakat. Moment ini juga dijadikan sarana konsolidasi teman-teman lapangan yang selama ini terus mendampingi saya sesuai dengan lokasi kunjungan", tutur Politisi PKS ini.

Anggota DPR ini membuat variasi kegiatan yang dilakukan, ada yang di dalam ruangan dan ada juga yang dilakukan di luar ruangan sehingga memperluas ruang gerak peserta yang ada.

"Upaya ini rutin dilakukan pada masa reses selain menyapa konstituen yang telah memilih dan bersama kami di PKS, juga merupakan wujud menunaikan tugas sebagai Wakil Rakyat dari Sumbar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Harapan kami adalah, ada kemajuan yang signifikan pada kualitas kehidupan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonominya", tutup Nevi Zuairina.



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Untuk mendukung program pemerintah, selain pembagian sembako, vaksin masal juga dilakukan selain kepada warga, juga kepada relawan PKS yang selama ini aktif membantu masyarakat. Moment ini juga dijadikan sarana konsolidasi teman-teman lapangan yang selama ini terus mendampingi saya sesuai dengan lokasi kunjungan",



# Masa Reses, Mahfudz Abdurrahman Silaturrahmi dan Dialog Tokoh se-Kota Bekasi

## KUTIPAN

Bekasi (19/10) --- Masa reses Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman diisi dengan kegiatan temu silaturahmi dan dialog tokoh ormas Islam, budaya dan penggerak UMKM se-Kota Bekasi, Minggu (17/10/2021).

Kedatangan Mahfudz Abdurrahman disambut para tokoh yang hadir di Griya Wulansari Bekasi Selatan sebagai tempat pertemuan tersebut.

Mahfudz Abdurrahman yang merupakan Wakil Rakyat dari Kota Bekasi dan Depok menyampaikan, saat ini PKS harus lebih banyak melakukan silaturahmi dan mendengarkan serta berusaha melaksanakan masukan dan nasehat dari para ulama dan tokoh juga masyarakat.

"Pada kesempatan silaturahmi ini saya ingin menyampaikan bahwa PKS lebih banyak mendengar dan berusaha menindaklanjuti saran, masukan dan nasehat dari para tokoh sekaligus menyerap aspirasi

konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Dan juga memberikan sosialisasi tentang perjuangan PKS di parlemen serta kegiatan kedewanan dan membahas isu-isu hangat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan harapan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bisa memahami atas isu-isu yang beredar", jelas Mahfudz.

Aleg PKS ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh dan konstituen yang terus mendukung konsistensi perjuangan PKS, dan kini PKS dalam beberapa

survei mengalami peningkatan elektabilitas, bahkan masuk dalam 3 besar.

"Hal ini tak lepas dari dampak PKS sebagai oposisi pemerintahan dan tetap melakukan silaturahmi karena politik PKS adalah politik silaturahmi yang kini giat dilakukan oleh PKS," ungkapnya.

Mahfudz menegaskan PKS tetap konsisten memperjuangkan janji politik pada Pemilu 2019 yakni memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama serta beberapa isu-isu keumatan yang peningkatan UMKM dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukannya.

Mahfudz pun meminta doa dan dukungan dari para ulama dan tokoh yang hadir agar PKS terus istiqamah memperjuangkan cita-cita kebangsaan untuk umat dan bisa menghadirkan kepemimpinan yang terbaik di Kota Bekasi maupun di Indonesia.

"PKS siap untuk menyuarakan kepentingan umat di parlemen dalam bentuk UU. Mohon doa dan dukungannya, saat ini PKS terus memperjuangkan



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"PKS tetap konsisten memperjuangkan janji politik pada Pemilu 2019 yakni memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama serta beberapa isu-isu keumatan juga peningkatan UMKM dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukannya.

beberapa RUU keumatan dan juga RUU yang lainnya seperti Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama sebagai bentuk penghormatan kepada Ulama dan Tokoh Agama, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Kewirausahaan Nasional. Dan PKS telah menyuarkan

penolakan RUU HIP Juga PKS secara tegas menyuarkan penolakan beberapa RUU untuk menjadi UU yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti RUU HPP dan RUU IKN".  
ujar Mahfudz.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Bertemu Komunitas Humas, Aus Hidayat Nur Ajak Populerkan Tokoh Partai

## KUTIPAN

Dalam sesi dialog, salah satu peserta bernama Yusuf yang baru berusia 17 tahun berharap agar Anggota DPR bisa mensupport peningkatan kemampuan anak muda.

Samarinda (19/10) — Kunjungan ke Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur berjumpa dengan para pegiat media, di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, (16/10/2021).

Diantaranya adalah penulis, fotografer, videografer, desainer, hingga konten creator lainnya. Dalam pertemuan, Aus Hidayat Nur menyampaikan dinamika politik nasional, termasuk juga kaitannya dengan isu-isu di DPR RI.

Anggota Komisi II ini menyatakan bahwa para pegiat humas sesungguhnya merupakan bagian penting dari setiap kebaikan.

"Harus lebih berani dan progresif menyampaikan kebaikan," pesannya.

"Termasuk dalam kaitan memunculkan tokoh-tokoh yang shalih sebagai calon pemimpin bangsa. Saat ini PKS dipimpin oleh Habib, yaitu Dr. Salim. Maka Humas bisa kenalkan Dr. Salim ke masyarakat, termasuk bersilatullah dengan para habaib," tambahnya.

Dalam sesi dialog, salah satu peserta bernama Yusuf yang baru berusia 17 tahun berharap agar Anggota DPR RI bisa mensupport peningkatan kemampuan anak muda.

Sementara Vera yang sudah bertahun-tahun membina sebuah Komunitas Menulis dengan anggota yang tersebar di berbagai propinsi berharap agar terus ada informasi yang disampaikan dari Aleg.

"Kami berharap

perkembangan kerja Aleg bisa terus diupdate kepada kami, sehingga kami mendapatkan konten-konten yang bisa mengimbangi berita-berita politik yang tidak bertanggungjawab," imbuhnya.

Sebelum ditutup, Aus Hidayat Nur juga berpesan, selain tokoh-tokoh nasional, sesungguhnya ada tokoh-tokoh lokal yang bisa terus dikenalkan. Kalau di PKS, seperti Ketua DPW beserta jajarannya, dan sebagainya.



**KH. AUS HIDAYAT NUR**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Pegiat humas merupakan bagian penting dari setiap kebaikan. Harus lebih berani dan progresif menyampaikan kebaikan, Termasuk dalam kaitan memunculkan tokoh-tokoh yang shalih sebagai calon pemimpin bangsa. Saat ini PKS dipimpin oleh Habib, yaitu Dr. Salim. Maka Humas bisa kenalkan Dr. Salim ke masyarakat, termasuk bersilatullah dengan para habaib

## Terkait Potensi Banjir di Calon Ibukota Baru, **Anggota FPKS: Proyek IKN Perlu Dikaji Lebih Jauh**

### KUTIPAN

Kabupaten Paser (10/10) — Anggota DPR RI Dapil Kaltim dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menanggapi peristiwa banjir yang melanda Long Kali, kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Banjir yang terjadi dekat dengan Calon Ibukota ini, terjadi di sejumlah titik pemukiman bahkan hingga sedada orang dewasa sejak 2 Oktober lalu.

Pria yang akrab disapa Kang Aus ini meminta agar musibah banjir yang terjadi di dekat Calon Ibukota baru ini bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan IKN di masa mendatang.

"Proyek IKN perlu kajian lebih jauh lagi dari segi lingkungan hidup maupun sosialnya. Seperti saat ini terjadi banjir di Paser, jangan sampai proyek IKN berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan karena wilayah yang digunakan merupakan lahan hutan yang HPL-nya diperuntukkan bagi

perkebunan sawit," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, diantara alasan pemindahan Ibukota Negara karena terjadinya penurunan tanah Jakarta sehingga rawan banjir. Namun, sudahkah dipastikan tanah Kaltim juga aman dari banjir?

Aus Hidayat Nur bahkan menyatakan, bahwa rencana pembangunan IKN baru ini sesungguhnya perlu transparansi yang melibatkan stakeholders Kaltim.

"Fraksi PKS sesungguhnya mengkhawatirkan terjadinya 'cultural shock' pada masyarakat Sepaku dan sekitarnya dengan kehadiran IKN di wilayahnya," tambahnya. Selengkapnya di fraksi.pks.id



### **KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi III DPR RI

"Proyek IKN perlu kajian lebih jauh lagi dari segi lingkungan hidup maupun sosialnya. Seperti saat ini terjadi banjir di Paser, jangan sampai proyek IKN berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan karena wilayah yang digunakan merupakan lahan hutan yang HPL-nya diperuntukkan bagi perkebunan sawit,

# Masa Reses di Dapil, Aus Hidayat Nur bersama BPN Sosialisasikan Program PTSL

## KUTIPAN

Samarinda (16/10) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur bersama Kakanwil BPN Kalimantan Timur menggelar sosialisasi program strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Aston Samarinda.

Salah satu program yang disosialisasikan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disebutkan oleh Kakanwil BPN Kalimantan Timur sebagai program yang lebih besar manfaatnya daripada program Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Namun Kakanwil menyatakan bahwa antusias masyarakat masih rendah untuk mengurus sertifikat tanah.

"Masyarakat harus antusias. Sertifikat penting sebagai asset dan agar terhindar sengketa di kemudian hari," jelas Asnaedi, Kakanwil BPN Kalimantan Timur.

Kepada Aus Hidayat Nur yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Kakanwil BPN Kaltim juga menyampaikan bahwa pengukuran tanah perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Utara sudah 100 persen.

Aus Hidayat Nur mengapresiasi kerja BPN, namun mengingatkan agar terus meningkatkan pelayanan.

"Tanah adalah sumber kehidupan dan diperlukan komitmen kebangsaan untuk meningkatkan fungsi pelayanan," tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengusulkan agar segera dibangun Kakanwil

Kaltara, sehingga tidak lagi bergabung dengan Kakanwil Kaltim.

"Penting segera dibangun Kakanwil Kaltara, agar lebih fokus dengan berpisahannya Kaltara," ingatnya.

Acara yang diikuti oleh 75 peserta dari masyarakat Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara ini, juga dihadiri oleh Kakantah BPN Samarinda Budi Tarigan. Diujung acara, secara simbolis BPN menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang hadir.



## KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Tanah adalah sumber kehidupan dan diperlukan komitmen kebangsaan untuk meningkatkan fungsi pelayanan. Penting segera dibangun Kakanwil Kaltara, agar lebih fokus dengan berpisahannya Kaltara"





*Selamat  
Milad*



H.  
**HIDAYA  
TULLAH**  
SE

24 OKTOBER

Semoga senantiasa  
diberi kesehatan dan keberkahan  
dalam usianya

# Bukhori Serahkan Bantuan Beras dan Advokasi Warga Tak Tersentuh Bansos di Dapil

## KUTIPAN

Semarang (18/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan beras bagi warga Kota Semarang yang tersebar di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Mijen.

Bantuan sebanyak 150 paket sembako diberikan dalam bentuk paket 5 kilogram beras bagi sejumlah warga tidak mampu di kawasan tersebut "Selain menyerahkan bantuan beras bagi warga, kami juga menyerap aspirasi dari para pengurus PKS tingkat DPC dan DPRa di Kota Semarang ihwal persoalan yang mereka alami. Aspirasi ini kelak kami teruskan ke pusat begitu masuk masa sidang," terang Bukhori di Semarang, Jumat (15/10/2021)

Dalam kesempatan sama, Bukhori juga mengadvokasi

salah seorang warga miskin di Kecamatan Mijen yang ternyata belum sama sekali tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.

Hal itu didapati Bukhori, setelah menerima aduan dari seorang warga yang merupakan tetangganya. Tetangganya mengaku, warga miskin ini menggantungkan kebutuhan pangannya dari sumbangan tetangga yang simpati atas penderitaan yang dialami.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Selain menyerahkan bantuan beras bagi warga, kami juga menyerap aspirasi dari para pengurus PKS tingkat DPC dan DPRa di Kota Semarang ihwal persoalan yang mereka alami. Aspirasi ini kelak kami teruskan ke pusat begitu masuk masa sidang"

# Masa Reses, Abdul Kharis Hadiri Bedah Buku Milad 116 Sarekat Islam

## KUTIPAN

Surakarta (18/10) -- Menjalani masa reses Reses, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari menghadiri Bedah Buku Sarekat Islam Surakarta Tahun 1912-1923 yang berlangsung di Omah Parang Kesit, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan pada Sabtu (16/10/2021).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Museum Samanhudi ini merupakan kegiatan rutin bulanan. Akan tetapi bertepatan dengan Milad ke 116 Sarekat Islam yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, maka diadakan Bedah Buku 'Sarekat Islam Surakarta Tahun 1912-1923'.

Bedah buku ini menghadirkan narasumber Adityawan Suharto (Penulis Buku) dan MS Ka'ban (Pemerhati Pergerakan Islam) dan dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta.

Tampak hadir dalam bedah buku ini Bambang Sutrisno (Anggota DPD RI), Perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, Pengurus Museum-Museum se

Surakarta dan Perwakilan keluarga H. Samanhudi. Tampak hadir pula mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki perhatian mempelajari Sejarah Bangsa.

Berperan sebagai Keynote Speaker, Abdul Kharis menyampaikan sangat mengapresiasi sekaligus bangga dengan bedah buku ini.

Mengapresiasi karena dengan keterbatasan yang ada, apalagi dimasa pandemi panitia bersemangat untuk menyelenggarakan bedah buku ini. Bangga karena buku ini ditulis oleh anak muda dengan sudut pandang yang berbeda.

"Mas Adityawan seorang yang masih muda tapi memiliki karya unik, yaitu memandang

Sarikat Islam dalam kaca mata lokal yaitu Surakarta" Ungkapnya.

"Membaca buku ini, saya merasakan menjadi bagian dari perjuangan Samanhudi dimasa itu" lanjutnya.

Apalagi, imbuhnya, Ketika Abdul Kharis jalan kaki keliling menyusuri Kampung Laweyan, terbangun betapa sulitnya Samanhudi mengajik masyarakat untuk berjuang dan bergerak. Hanya orang-orang yang berjiwa pemberani dan tahan banting saja yang mau bergabung bersama Samanhudi.

"Buku ini memberikan gambaran semangat Samanhudi di jaman itu. Dan saat ini Samanhudi era tahun 2020 an harus bisa mengambil hikmah dan meneladani semangat Samanhudi. Selamat menikmati bedah buku ini, karena buku adalah jendela dunia" pungkasnya.

Dalam sambutannya ketua panitia, Chairul Syarwani, mengatakan "Kenapa saya diminta menjadi ketua panitia? Karena saya ketua RT dimana beliau H. Samanhudi dahulu tinggal di RT saya. Walau sekarang sebagian besar peninggalan beliau sudah dimiliki orang lain".



## Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

"Membaca sejarah menimbulkan pencerdasan berpikir. Sarekat Islam merupakan even sejarah kebangkitan perjuangan melawan Penjajahan. Mengisi babak baru perjuangan melawan penjajah, karena setelah perjuangan Pangeran Diponegoro tahun 1825 nyaris tidak ada gerakan. Dan terbukti banyak tokoh Sarekat Islam menjadi pahlawan nasional. Mereka memiliki saham untuk Indonesia merdeka"

Chairul juga menyampaikan bahwa Museum Samanhudi merupakan salah satu dari sedikit museum yg dimiliki oleh warga.

"Kami senang banyak generasi muda yang hadir

dalam bedah buku ini, karena kami berharap museum mampu menjadi tonggak menanamkan semangat perjuangan", paparnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Bersama Kementan, Andi Akmal **Hadiri** Bimtek Peningkatan Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan

## KUTIPAN

Kabupaten Bone (16/10) -- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menggelar Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha peternakan di Bone, tepatnya di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

Akmal menyampaikan, bahwa para peternak selama ini sudah ahli dalam menangani berbagai persoalan teknis di lapangan dalam hal pembesaran. Namun untuk breeding, perlu keahlian khusus dan tidak semua peternak ada di sektor ini.

"Hal yang perlu ditingkatkan adalah manajemen peternakan secara keseluruhan. Baik aspek teknis mulai dari hulu hingga hili, hingga persoalan organisasi peternak termasuk dalam pengelolaan keuangan usaha peternakan", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, stabilisasi pangan pada

komoditas peternakan, harus diawali dengan stabilisasi pakan. Untuk itu ia meminta Pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan bahan pakan terutama pada saat harga jagung mengalami peningkatan serta meminta agar pemasukan gandum dipisahkan menjadi kategori food (pangan) dan feed (pakan) dalam rangka untuk melindungi petani jagung dan peternak rakyat.

Begitu juga dalam persoalan kelembagaan peternak, Legislator Sulawesi Selatan II ini secara khusus agar ada sinergi yang baik antara peternak dan pemerintah yang dimulai deng-

an pendampingan yang lebih intensif dari program-program yang sebelumnya pernah ada di kementerian seperti Sarjana Membangun Desa (SMD) atau program penyelamatan sapi betina produktif.

"Program-program yang selama ini sudah berjalan masih perlu peningkatan kualitas yang lebih baik. Pemerataan dan peningkatan kualitas masih perlu ditingkatkan dalam persoalan pendampingan pada peternak rakyat. Bimbingan teknis ini mudah-mudahan sebagai pembuka pintu awal komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan para pelaku usaha peternakan", ungkap Akmal.

Putra kelahiran Bone ini menyarankan, bahwa Litbang Kementerian Pertanian mesti secara intens bekerjasama dengan BUMN untuk pengembangan bibit unggul peternakan. Inovasi khusus dari Dirjen Teknis sangat diperlukan untuk mendukung peternak, seperti peternak unggas.



## Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Program-program yang selama ini sudah berjalan masih perlu peningkatan kualitas yang lebih baik. Pemerataan dan peningkatan kualitas masih perlu ditingkatkan dalam persoalan pendampingan pada peternak rakyat. Bimbingan teknis ini mudah-mudahan sebagai pembuka pintu awal komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan para pelaku usaha peternakan",

Akmal menambahkan, meskipun Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalami penurunan dari 1, 58 T menjadi 1,31 T, namun upaya meningkatkan

kuantitas dan kualitas komoditas peternakan secara nasional mesti terus ditingkatkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ringankan Beban Korban Kebakaran di Cibalong Tasikmalaya

## KUTIPAN

Tasikmalaya (18/10) -- Kejadian tak diduga terjadi di Kampung Mekarjaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu malam (13/10). Rumah milik keluarga Yunus Juhana, terbakar tak tersisa. Peristiwa itu terjadi diperkirakan akibat konsleting listrik.

Bersama para kader PKS kecamatan Cibalong, Politisi Senayan Toriq Hidayat mendatangi korban (16/10) dan memberikan bantuan. Ia berharap kontribusi berupa dana tunai ini dapat meringankan beban keluarga Yunus.

"Berebekal info yang diberikan oleh Ketua DPC PKS Kecamatan Cibalong. Saya mewakili PKS, hadir ke keluarga Pak Yunus. Untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan bantuan. Mudah-mudahan dana tunai yang diterima bisa meringankan beban beliau sekeluarga," tuturnya.

Dalam musibah itu, diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Termasuk terbakarnya

beberapa dokumen penting seperti Akta kelahiran, Ijazah dan surat-surat tanah miliknya.

Toriq berharap korban menerima kejadian ini sebagai takdir dari Allah SWT. "Selama hayat masih dikandung badan, niscaya manusia tidak akan luput dari musibah dan cobaan. Manusia hanya bisa berikhtiar untukantisipasi dan ber-istirja," katanya.

Mengembalikan segalanya kepada Allah SWT, tambah Toriq, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya). Berdoa, Ikhlas dan lapang dada dalam menghadapinya, agar kita mendapatkan rahmat dan pahala-Nya.

Selaku Anggota Komisi V DPR RI, Ia juga sangat prihatin dengan musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutrnya hampir 1 kali dalam sebulan si jago merah melalap habis rumah dan kios pasar.

"Yang saya tahu saja, ada 4 kejadian musibah kebakaran dalam jangka waktu 4 bulan terakhir. Musibah kebakaran di Kampung Kertamukti, Pasar Ciawi, Kampung Gentong, sekarang Kampung Mekarjaya," sebut Toriq.

Kedepannya, Toriq berharap seluruh masyarakat berusaha mengantisipasi kebakaran. "Dengan mematkan lampu dan cabut kabel setelah selesai memakai peralatan listrik, tidak menumpuk steker pada satu terminal listrik, merawat instalasi listrik secara berkala, dan menjauhkan benda yang mudah terbakar dari instalasi listrik", tutup Toriq.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Berebekal info yang diberikan oleh Ketua DPC PKS Kecamatan Cibalong. Saya mewakili PKS, hadir ke keluarga Pak Yunus. Untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan bantuan. Mudah-mudahan dana tunai yang diterima bisa meringankan beban beliau sekeluarga



# Perkuat Pelayanan pada Masyarakat, Syahrul Aidi Kumpulkan Fraksi PKS se-Riau

**KUTIPAN**

Pekanbaru (15/10) --- Ditengah kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menyempatkan diri melakukan koordinasi dengan Fraksi PKS DPRD kabupaten dan kota di Riau.

Koordinasi ini dinilai efektif untuk meneguhkan tagline PKS yaitu #bersamamelayanirakyat di Provinsi Riau.

Hal ini digelar disela-sela pelaksanaan Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) DPW PKS di Hotel Grand Central, Pekanbaru, Riau, Kamis (14/10/2021).

"Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan koordinasi insidentil dengan seluruh anggota DPRD kabupate kota se-Riau. Karena kita masing-masing sibuk dengan aktifitas pelayanan masyarakat di daerah masing-masing. Maka momen seperti ini kita manfaatkan," kata Syahrul Aidi usai rapat.

Syahrul Aidi menambahkan, kegiatan ini

juga sebagai sinkronisasi program dan aspirasi. Banyak aspirasi masyarakat yang penganggarannya tidak ada di tingkat masing-masing.

"Pelayanan kepada masyarakat ini tak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi bersama. Mana tau, ada aspirasi masyarakat yang perlu disinergikan dengan fraksi PKS yang lebih tinggi. Dan saya sebagai perwakilan di senayan siap bersinergi dengan seluruh fraksi PKS di Riau," sebut Syahrul Aidi.

Langkah koordinasi Syahrul Aidi ini mendapat pujian dari fraksi PKS se-Riau. Bahkan momen ini mereka jadikan waktu untuk curhat tentang kondisi di daerah masing-masing. Salah satunya dari M

Syafaat anggota DPRD Inhu yang memuji langkah Syahrul Aidi.

"Apa yang dilakukan Ustadz Syahrul ini sudah jadi pembicaraan di beberapa daerah. Bahkan kepala daerah atau politisi Parpol lain memuji secara terus terang ke kita. Nama ustadz Syahrul Aidi mentereng sekarang ini," kata Syafaat.

Pujian yang sama datang dari Ketua DPD PKS Pekanbaru, Ahmiyul Rauf, yang menyebut koordinasi dadakan ini momen yang sangat ditunggu oleh pengurus, fraksi dan kader PKS. "Banyak isu pembangunan yang harus dikoordinasikan," katanya.



**H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Kegiatan ini juga sebagai sinkronisasi program dan aspirasi. Banyak aspirasi masyarakat yang penganggarannya tidak ada di tingkat masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat ini tak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi bersama. Mana tau, ada aspirasi masyarakat yang perlu disinergikan dengan fraksi PKS yang lebih tinggi. Dan saya sebagai perwakilan di senayan siap bersinergi dengan seluruh fraksi PKS di Riau."

# Selenggarakan Lomba Baca Rawi, **HNW: Kami Ingin Lestarkan Budaya dan Tradisi Baik di Masyarakat**

## KUTIPAN

Jakarta (17/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan menyelenggarakan lomba pembacaan Rawi Simtudurror untuk masyarakat di Jakarta Selatan.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan, tujuan pembacaan Rawi yakni dengan harapan untuk menghormati budaya positif yang ada di masyarakat, juga meneruskan kegiatan seni yang sudah menjadi tradisi di masyarakat penganut AhlulSunnah wal jamaah di Indonesia, khususnya Betawi.

"Ini komitmen PKS dalam menjaga dan melanjutkan tradisi dan budaya yang baik di masyarakat. Kami sebelumnya juga telah membuat lomba hadroh, marawis, dan juga lomba olahraga, seperti badminton dan lain sebagainya," ujarnya saat

membuka lomba pembacaan rawi ini di Jakarta Selatan, Sabtu (16/10).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa PKS sebagai partai politik Islam meyakini bahwa tradisi-tradisi yang baik di masyarakat harus terus dilanjutkan, apalagi Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945 juga mengamankan untuk menjaga dan meningkatkan budaya nasional yg mengakar di Indonesia, seperti pembacaan Rawi, Hadhran dan lainnya.

"Kami yakin bahwa politik Islam justru dalam rangka menguatkan seni dan budaya positif yang berkembang dan

diterima di tengah masyarakat, karena politik yang baik tidak akan lepas dari akar budaya. Kami hadir untuk mendukung dan melestarikan budaya baik yang menyebar di masyarakat Indonesia, misalnya dengan rawi, hadroh, marawis dan lain sebagainya. Untuk itulah berbagai perlombaan kami lakukan, agar cinta budaya ini menyebar dan diminati oleh Masyarakat, yang ternyata antusiasme mereka sangat tinggi," ujarnya.

"Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah secara rutin dilakukan setiap tahun. Peringatan Maulid itu juga merupakan tradisi yang baik. Dan itu menegaskan posisi PKS yang tidak anti maulid, melainkan justru mengajak Umat dan bangsa Indonesia, meneladani Rasulullah SAW yang sukses hadirkan masyarakat Madani dan Islam yang Rahmatan lil alamin," tambah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Dalam lomba pembacaan Rawi ini, HNW mengingatkan kepada peserta untuk tidak



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Ini komitmen PKS dalam menjaga dan melanjutkan tradisi dan budaya yang baik di masyarakat. Kami sebelumnya juga telah membuat lomba hadroh, marawis, dan juga lomba olahraga, seperti badminton dan lain sebagainya"

sekedar membaca dan melantukan syairnya, tetapi juga menghayati dan memahami artinya yang sangat luar biasa berisi perjalanan hidup,

keteladanan dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



PKS



**Akun Facebook Official  
Fraksi PKS DPR RI**

**BERPINDAH**

dari **Fraksi PKS DPR RI**  
menjadi

**FPKS DPR RI**



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



PKS TV DPR RI

# PKS Siap Perjuangkan Aspirasi IDI Terkait RUU Praktek Kedokteran

## KUTIPAN

“PKS sangat terbuka dengan aspirasi dari masyarakat, kami juga siap membantu terwujudnya RUU ini. Harapannya, silaturahmi dan komunikasi ini akan dapat terus terjalin untuk memperkaya dan memperdalam pembahasan RUU agar lebih matang.” Ujar Mufida.

Jakarta (15/10) Legislator Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati menerima kunjungan penyampaian aspirasi dar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai Rancangan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Mufida menjelaskan bahwa sejauh ini, RUU Kedokteran ini sudah diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas lebih dalam setelah sebelumnya melalui pembahasan dari Badan Legislatif. Perwakilan IDI berharap bahwa RUU ini dapat mengintegrasikan antara pendidikan dan profesi sesuai dengan porsinya. “Kami akan bantu

perjuangkan agar RUU ini bisa masuk dalam prolegnas tahun 2022. Adanya RUU ini juga diharapkan mampu memberikan standar yang jelas bagi mutu pendidikan serta kurikulum kedokteran.” Ucap Anggota Komisi IX DPR RI ini. Mariya Mubarika juga menyampaikan dalam aspirasinya bahwa RUU yang sudah digagas dari tahun 2017 ini juga dibentuk untuk menyetarakan kompetensi pendidikan dalam tingkat global agar tidak tertinggal dengan negara lain. Kepala Bidang Advokasi PB IDI ini juga mengungkapkan apresiasinya kepada fraksi PKS yang telah bersedia bergandengan tangan

membantu merealisasikan aspirasi IDI disaat para pejabat ingin mengimpor dokter. “Jangan sampai pendidikan kedokteran ini menghasilkan produk yang tidak humanis dalam profesi. Pendidikan kedokteran juga seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan, dan kami percayakan aspirasi ini kepada kawan-kawan di PKS” Jelas Daeng M Faqih, Ketua Pengurus Besar IDI. Di sisi lain, Mufida juga sangat mengapresiasi kinerja IDI dalam memperjuangkan RUU Praktek Kedokteran selama 4 tahun terakhir. “PKS sangat terbuka dengan aspirasi dari masyarakat, kami juga siap membantu terwujudnya RUU ini. Harapannya, silaturahmi dan komunikasi ini akan dapat terus terjalin untuk memperkaya dan memperdalam pembahasan RUU agar lebih matang.” Ujar Mufida.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

“Sejauh ini, RUU Kedokteran ini sudah diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas lebih dalam setelah sebelumnya melalui pembahasan dari Badan Legislatif. Perwakilan IDI berharap bahwa RUU ini dapat mengintegrasikan antara pendidikan dan profesi sesuai dengan porsinya. Kami akan bantu perjuangkan agar RUU ini bisa masuk dalam prolegnas tahun 2022. Adanya RUU ini juga diharapkan mampu memberikan standar yang jelas bagi mutu pendidikan serta kurikulum kedokteran.”

# HNW: Pemuda Harus Waspadai Pengaburan Sejarah, Bangun Soliditas Jaga NKRI dan Pancasila

## KUTIPAN

Jakarta (10/10) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengingatkan para Pemuda, apalagi Pemuda Muslim, akan pentingnya memahami sejarah bangsa secara utuh dan membangun soliditas dan solidaritas bersama komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan dan menjaga NKRI dan Pancasila.

Apalagi, kata Hidayat, dengan adanya upaya pengaburan sejarah, dan tantangan-tantangan lokal dan global seperti separatisme, neo kolonialisme dan pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid saat menjadi narasumber dalam seminar nasional bertema ‘Peran Pemuda dalam Mengokohkan Simpul Kebangsaan di Tengah Kemajemukan dan Pandemi’.

Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dan Gema Keadilan DKI Jakarta di Jakarta

Selatan, Sabtu (19/10).

Acara yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan, Ketua Umum KNPI dan Presiden Gema Keadilan.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa pemahaman sejarah bangsa yang utuh dan benar perlu dimiliki oleh pemuda di Indonesia.

"Agar Pemuda Indonesia termasuk generasi Muda Muslim, bangsa dengan perjuangan hebat Pemuda/Bapak/Ibu Bangsa agar bisa dilanjutkan, supaya

mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh upaya-upaya pengaburan sejarah Bangsa dan peran tokoh-tokoh Umat Islam," ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut HNW, pemuda dan generasi milenial yang bisa memiliki akses-akses informasi dan berita dari berbagai media harus meleak informasi dan jangan menyalahi potensi dan momentum yang mereka miliki.

HNW mencontohkan adanya upaya pengaburan sejarah terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebanyak dua kali, pada 1948 dan 1965.

"Ada upaya yang menarasikan bahwa PKI bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Padahal korban kejahatan PKI sudah banyak berjatuhan dari Para Kiyai, Santri, Gubernur Jawa Timur, dan beberapa Jendral TNI AD. Karena pemberontakan PKI bahkan tidak hanya dilakukan sekali saja," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



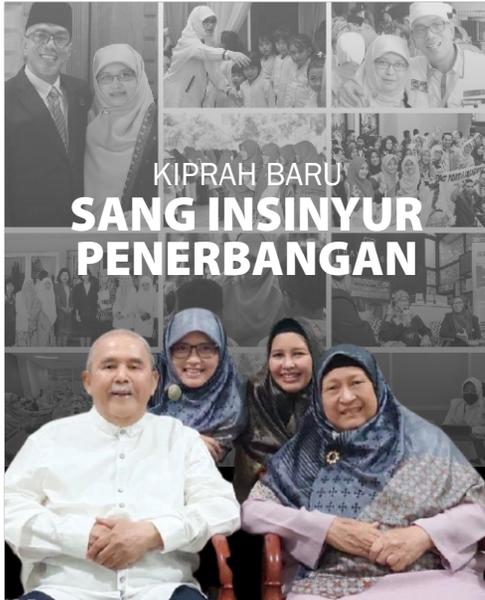
**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Walau Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial itu telah ditarik karena memperoleh banyak protes keras dari masyarakat luas, termasuk oleh PKS, tetapi itu menunjukkan bukti nyata adanya usaha penulisan sejarah yang baru dengan pengaburan sejarah, atau penampilan pemahaman sejarah yang tidak utuh, sayangnya itu justru ada pada institusi pemerintahan,”

## PROFIL

### Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol



**S**ahabat dan rekan fraksi PKS DPR RI yang dimulikan oleh Allah SWT

Kita akan berkenalan dengan Anggota FPKS DPR RI Diyah Nurwitasari anggota dari DAPIL Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Teh Diah biasa dipanggil, merupakan kelahiran Bandung pada tanggal 24 oktober 1967

dari pasangan Bapak Nuriata dan Ibu Siti Djubaedah. Teh Diah anak pertama dari 2 bersaudara, dikenal cerdas dan senang bergaul.

Pendidikan diawali dari kota kelahirannya Bandung, dari SDN Merdeka 5, Bandung (1973-1979), kemudian SMPN 1 Bandung (1979-1982) dan SMAN 3 Bandung (1982-1985).

Kemudian teh Diah

sempat menjejak di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Padjadjaran (1985-1986), namun kala itu tidak dilanjutkan karena lolos seleksi Beasiswa PT IPTN atau PT Dirgantara Indonesia sebagai Program Prof. Dr.-Ing B.J. Habibie

Istri dari Abdul Wijaya Hadi ini ternyata mengambil studi di Studien Kolleg Hannover, Jerman (1986-1987). Kemudian Luft- und Raumfahrtstechnik (Aeronautical Engineering), Technische Universitaet (TU) Braunschweig, Jerman (1987-1994). Flugzeugbau (Teknik Konstruksi Pesawat Terbang), Fachhochschule / University of Applied Science Aachen, Jerman (1994-1995).

Ternyata perjalanan hidup Teh Diah untuk kesekian kali menerobos "ruang baru", selepas jadi 'Engineer' kemudian terjun menjadi politisi. Dua periode menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009 dan 2009-2014.

Komitmen Teh Diah tidak main-main, dirinya kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Padjajaran menuntaskan Magister Ilmu Pemerintahan. Sekarang sedang melanjutkan program Doktor Ilmu Pemerintahan di FISIP Unpad.

Teh Diah turut serta aktif di berbagai forum kegiatan keagamaan, sosial dan keilmuan.

Selain secara khusus dirinya memiliki banyak pengalaman dalam bidang aircraft, dika-

renakan profesi sebelumnya sebagai aircraft performance engineer PT Dirgantara Indonesia.

Beliau juga pernah menjadi Dosen Non Organik sesko TNI AD padavtahun 2006, serta pernah sebagai tenaga ahli anggota DPR RI untuk periode 2014-2021. Teh Diah saat ini juga diamanahkan untuk menjadi Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat. Anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) dari 2013 hingga sekarang dan Ketua Bidang organisasi DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

Teh Diah dalam kesibukan

Teh Diah dalam kesibukan tetap berkontribusi di kepartaian dengan mengemban sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS.

tetap berkontribusi di kepartaian dengan mengemban sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS.

**SOCMED**

Untuk mengetahui sepak terjang Dipl. Ing. Hj. Diyah Nurwitasari, M.I.Pol dapat mengikuti sosial media

Facebook : Diyah Nurwitasari II  
Fanpage : Diyah Nur  
Twitter : @diah\_nur  
Instagram : @diahnurpks





**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***